

Dr. Hj. Aah Tsamrotul Fuadah, M.Ag

# **BUKU DARAS PERADILAN AGAMA DI INDONESIA**



## **BUKU DARAS PERADILAN AGAMA DI INDONESIA**

**Penulis:**

**Dr. Hj. Aah Tsamrotul Fuadah, M.Ag.**

**ISBN: 9786-239-471-41-5**

**Penyunting:**

Lutfi Fahrul Rizal

**Desain Sampul dan Tata letak:**

Alan Maulana

**Penerbit:**

**PT. Liventurindo**

Jl. Cigentur, Paseh - Bandung

Tlp. 081221759136

liventurindo@gmail.com

v + 138 hlm.; 24 cm.

Cetakan pertama, Februari 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat dan limpahan hidayahnya sehingga buku yang berjudul "**Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia**" ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditargetkan pada sebelumnya.

Keberadaan karya ini, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi perkembangan khasanah keilmuan dan praktik, *wabilkhusus* yang berkaitan dengan peradilan agama di Indonesia.

Bandung, Februari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	- ii -
DAFTAR ISI .....	- iii -
PENGERTIAN, DASAR DAN PRINSIP PERADILAN DALAM ISLAM .....	- 1 -
A.    Pengertian Peradilan dan Pengadilan .....	- 1 -
B.    Peradilan Pada Masa Jahiliyah .....	- 3 -
C.    Unsur-Unsur Peradilan Islam .....	- 4 -
D.    Dasar Hukum Peradilan dalam Islam .....	- 6 -
REFERENSI : .....	- 19 -
KONDISI PERADILAN PRA ISLAM DI INDONESIA .....	- 20 -
A.    Sejarah Peradilan Pra Islam .....	- 20 -
B.    Sejarah Peradilan Pra Rasulullah SAW .....	- 22 -
C.    Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Nabi SAW .....	- 25 -
D.    Peradilan Pada Masa Sahabat (Khulafaurasyidin) .....	- 28 -
E.    Peradilan Pada Masa Bani Umayyah.....	- 30 -
F.    Peradilan Pada Masa Bani Abbasiyah dan Sesudahnya ...	- 32 -
REFERENSI : .....	- 34 -
PERADILAN ISLAM PADA MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA.....	- 35 -
A.    Sejarah, Bentuk, dan Sistem Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Islam.....	- 35 -
B.    Periode Perkembangan Pembentukan Peradilan.....	- 40 -
REFERENSI : .....	- 42 -
HUBUNGAN KEKUASAAN POLITIK DAN POLITIK HUKUM PADA MASA PENJAJAHAN.....	- 43 -
A.    Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda.-	43 -
B.    Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Pendudukan Jepang.....	- 52 -
REFERENSI : .....	- 55 -

SUSUNAN DAN KEKUASAAN PA MASA PENJAJAHAN A.....	56 -
A.    Masa Kolonial Hindia Belanda.....	56 -
B.    Masa Penjajahan Jepang .....	63 -
REFERENSI :.....	66 -

PERADILAN AGAMA DALAM TATA PERADILAN DI INDONESIA	
SEJAK MASA KEMERDEKAAN.....	67 -
Periode 1945 – 1957.....	68 -
Periode 1957 – 1974.....	70 -
Periode 1974 – 1989.....	71 -
REFERENSI :.....	73 -

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI (SO) PERADILAN	
AGAMA DI INDONESIA .....	74 -
A.    Susunan Hierarki Peradilan Agama .....	74 -
B.    Susunan Organisasi Peradilan Pengadilan Tinggi Agama.....	78 -
REFERENSI :.....	79 -

KEKUASAAN PA PADA MASA KEMERDEKAAN .....	80 -
(DARI TAHUN 1957 – TAHUN 1998) .....	80 -
A.    Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia	
Pada Masa Kemerdekaan.....	80 -
B.    Peradilan Agama Pasca Awal Kemerdekaan.....	81 -
C.    Masa Orde Baru.....	83 -
D.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.....	84 -
E.    Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 .....	85 -
REFERENSI :.....	87 -

KONDISI DAN KEKUASAAN PERADILAN AGAMA PADA MASA	
REFORMASI.....	88 -
A.    Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Satu Atap.....	88 -
B.    Peradilan Agama Sejak Amandemen.....	91 -
C.    Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Agung.....	97 -
REFERENSI:.....	104 -

PIMPINAN DAN HAKIM PERADILAN AGAMA .....	- 105 -
REFERENSI : .....	- 107 -
 PANITERA, SEKRETARIS DAN JURUSITA PENGADILAN AGAMA-	108 -
A.    Panitera Pada Pengadilan Agama .....	- 108 -
B.    Sekretaris Pada Pengadilan Agama .....	- 113 -
 SUMBER HUKUM MATERIL DAN FORMIL PA .....	- 117 -
A.    Pengertian Hukum Materiil dan Formil.....	- 117 -
B.    Hukum Materiil Peradilan Agama.....	- 117 -
C.    Hukum Formil Peradilan Agama .....	- 120 -
REFERENSI : .....	- 126 -
 PROSPEK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA .....	- 127 -
A.    Dinamika Peradilan Agama dalam Konteks Historis.....	- 129 -
B.    Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No.3 tahun 2006.....	- 132 -
C.    Prospek Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia.....	- 134 -
REFERENSI : .....	- 138 -

## **PENGERTIAN, DASAR DAN PRINSIP PERADILAN DALAM ISLAM**

Salah satu bidang ilmu agama Islam yang dikembangkan dalam lingkungan perguruan tinggi ialah hukum Islam dan pranata sosial. Ia terdiri atas berbagai bidang studi, di antaranya peradilan Islam (*al-Qadha' fi al-Islam*) yang mendapat perhatian cukup besar di kalangan fuqaha dan para pakar di bidang lain. Demikian halnya peradilan Islam di Indonesia, yang secara resmi dikenal sebagai peradilan agama, mendapat perhatian dari kalangan pakar hukum Islam, hukum tata negara, sejarah, politik, antropologi dan sosiologi. Ia menjadi sasaran pengkajian, yang kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian, monografi, skripsi, tesis, disertasi dan buku daras. Hasil pengkajian itu, sebagian diterbitkan dan disebarluaskan.

Di samping itu, peradilan Islam menjadi bahan pengkajian dalam berbagai pertemuan ilmiah, baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun di kalangan pembina badan peradilan dan organisasi profesi di bidang itu. Publikasi hasil pengkajian itu dapat ditemukan dalam berbagai kumpulan karangan dan dalam jurnal. Ia akan tetap menarik sebagi sasaran pengkajian, khususnya di Indonesia, karena memiliki keunikan tersendiri sebagi satu-satunya institusi keislaman yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan sendirinya, muncul tuntutan pemetaan wilayah pengkajian dan metode yang tepat untuk digunakan. Bahkan, membutuhkan perumusan model pengkajian yang jelas, agar pengkajian peradilan Islam dapat dilakukan secara berkesinambungan dan produknya mendekati gambaran yang sebenarnya.

### **A. Pengertian Peradilan dan Pengadilan**

Dalam pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia dan peradilan pada umumnya, terdapat berbagai kata atau istilah khusus, diantaranya peradilan, badan kehakiman, badan peradilan, dan

Pengadilan. Istilah-istilah demikian dapat ditemukan dalam berbagai sumber.<sup>1</sup>

Dalam Bahasa Arab, peradilan biasa disebut *Qadha* yang berarti menyelesaikan, menunaikan serta bermakna memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Sedangkan hukum pada asalnya bermakna menghalangi atau mencegah.<sup>2</sup>

Sedangkan jika dilihat dari segi istilah ahli fiqh, qadha berarti lembaga hukum dan perikatan yang harus dituruti serta diucapkan oleh seseorang yang memiliki wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>3</sup>

Istilah Peradilan dan Pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian yang berbeda, perbedaannya adalah :

1. Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.
2. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:

- a. Proses mengadili
- b. Upaya untuk mencari keadilan
- c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan
- d. Berdasar hukum yang berlaku

Istilah peradilan itu senantiasa melekat dengan istilah pengadilan. Secara terminologi, kedua istilah itu berbeda, tetapi keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan, bagaikan anak panah dengan busurnya, pedang dengan sarangnya, dan jadam dengan

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, 1.

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet 1, Semarang : PT Pustaka Rizki Puta, 1997, 33.

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2003, 47.



pahitnya. Karena pada dasarnya, pengadilan itu merupakan tempat diselenggarakannya peradilan. Dengan demikian, pengadilan itu dapat dibedakan dari peradilan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Peradilan merupakan piranti lunak yang abstrak, sedangkan pengadilan menjadi piranti keras yang konkret dan terlembaga.

Adapun Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga Peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dalam bidang keperdataan saja, tindak pidana serta hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia.<sup>4</sup>

## **B. Peradilan Pada Masa Jahiliyah**

Ada 4 macam peradilan bagi bangsa Arab di masa jahiliyah yaitu:

- a. Badan Hukumah yaitu suatu bentuk lembaga kehakiman yang dipegang oleh Banu Saham, salah satu kabilah di kalangan bangsa Quraisy. Para hakimnya yang terkenal adalah Hasyim bin Abdi Manaf, Abu Lahab dan Aksam bin Shaifi.
- b. Badan Ihtikam yaitu bentuk peradilan yang menyerupai peradilan adat. Para hakimnya adalah tukang-tukang tenung. Mereka dianggap mampu berhubungan dengan makhluk halus dan mereka dianggap punya kemampuan untuk mengetahui rahasia melalui firasat dan karinah-karinah dari suara dan gerak gerik orang yang berbicara.
- c. Badan Qur'ah yaitu bentuk peradilan dengan cara mengundi tapi masih dikuatkan dengan kesaksian.<sup>5</sup>
- d. Dewan Mazhalim yaitu lembaga peradilan luar biasa untuk menangani perkara khusus yang dihadapi orang-orang

---

<sup>4</sup> Rosihon A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. X, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, 5.

<sup>5</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2011, 41.

yang lemah teraniaya, dalam menghadapi orang-orang kuat dan berkuasa.

### **C. Unsur-Unsur Peradilan Islam**

Unsur-unsur peradilan Islam disebut juga dengan rukun *qadha'*. Secara bahasa, rukun yaitu bagian yang kuat, yang berfungsi menahan sesuatu. Secara istilah, rukun berarti bagian tertentu yang mesti dari sesuatu, karena terwujudnya sesuatu itu mesti dengan adanya bagian itu. Jadi, rukun *qadha'* (unsur-unsur peradilan) yaitu apa yang menunjukkan eksistensi peradilan itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ahli fiqih menyebutkan bahwa peradilan Islam mempunyai lima rukun atau unsur, yaitu:

#### **a) Hakim (*qadhi*)**

Yakni orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan dan perselisihan, dikarenakan penguasa tidak bisa melaksanakan sendiri tugas-tugas peradilan. Sebagaimana yang dilakukan nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya. Beliau mengangkat *qadli-qadli* untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat yang jauh.

#### **b) Hukum (*qodho'*)**

Yaitu suatu keputusan produk *qadli* untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan. Ada dua bentuk keputusan hakim:

- *Qadla' ilzam*, yaitu menetapkan hak/macam hukuman kepada salah satu pihak dengan redaksi "aku putuskan atasmu demikian", atau menetapkan suatu hak dengan tindakan, seperti pembagian secara paksa.
- *Qadla' tarki* (penetapan berupa penolakan). Seperti ucapan *qadli* kepada penggugat: kamu tidak berhak menuntut dari tergugat, karena kamu tidak mampu membuktikan, dan atas sumpah tergugat.

c) *Al-mahkum bih* (hak)

Yaitu sesuatu yang diharuskan oleh qadli untuk dipenuhi atas suatu hak. Pada qadla' ilzam, yang dimaksud adalah dengan memenuhi hak penggugat. Sedangkan pada qadla' tarki, yang dimaksudkan adalah penolakan atas gugatannya itu. Atas dasar itulah, al-mahkum bih adalah hak itu sendiri. Hak itu adakalanya hak Allah semata, hak manusia semata, atau hak yang dipersekutukan antara Allah dan manusia tetapi salah satu lebih berat.

Apabila hak yang dituntut itu merupakan hak manusia semata, atau menurut lazimnya merupakan hak manusia, maka penuntutnya adalah pemilik hak itu sendiri, atau orang yang diberi kuasa olehnya. Si penuntut itu disebut mudda'i (penggugat). Jika ternyata dia tidak menuntut atau membatalkan tuntutan, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menuntut haknya. Apabila hak yang dituntut itu adalah hak Allah semata-mata atau menurut lazimnya hak itu merupakan hak Allah, maka tuntutan itu dilakukan oleh penuntut umum (jaksa). Menurut hanafiyyah, yang dimaksud hak Allah adalah hak masyarakat (publik).

d) *Al-mahkum 'alaih*

Yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya. Mahkum 'alaih yaitu orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya, baik ia *mudda'a alaih* (tergugat) atau *mudda'i* (penggugat).

e) *Al-mahkum lahu*

Yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata (hak perdata), atau hak yang lazimnya merupakan hak manusia semata-mata. Mahkum lah harus melakukan sendiri gugatan atas haknya atau dengan perantaraan orang yang diberi kuasa olehnya, dan ia harus datang sendiri ke persidangan atau wakilnya. Adapun bila hak itu merupakan hak Allah semata, maka mahkum lah-nya adalah syara'. Dalam hal ini, tuntutan bukan datang dari perorangan, tetapi sesuai syari'at Islam. Tuntutan itu dilakukan oleh lembaga penuntut umum.

Adapun mengenai Peradilan dalam perkembangan khazanah hukum Islam (fiqh), menggunakan istilah *al-qadha* untuk peradilan dan mahkamah al-qada bagi pengadilan. Sedangkan *qadhi* adalah

hakim. *Al-qadha* secara etimologis mengandung makna *musytarak* (banyak arti bukan tunggal). Muhammad Salam Madkur memberi tiga arti kata *al-qadha*, yakni *pertama*, *al-farag* yang berarti putus atau selesai. *Kedua*, *al-Ada'a* yang berarti menunaikan atau membayarkan. *Ketiga*, *al-bukmu*, yang berarti mencegah atau menghalang-halangi. Menurut ulama fuqaha, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur, istilah peradilan atau *al-Qadha* adalah *al-Ikthbar'an hukm syar'i 'ala sabil al-Izam*, artinya menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan.<sup>6</sup>

## D. Dasar Hukum Peradilan dalam Islam

### 1. Dasar-dasar peradilan menurut al-Qur'an

- يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. (ص 26)

Wahai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah ksmu mrngikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. (Shad ayat 26)

- وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ... (المائدة 49)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian

---

<sup>6</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha Fil al-Islam*, Kairo : Dar an-Nadha al-Arabiyyah, t.th, 11.

apa yang telah diturunkan Allah kepadamu ... (Al-Maidah ayat 49)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مِمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا  
تَسْلِيمًا ( النساء 65)

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (al-Nisa ayat 65)

## 2. Dasar-Dasar Peradilan dari Al-Hadits

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ : قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ ،  
قَاضٍ عَمِلَ بِالْحَقِّ فِي قَضَائِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ، وَقَاضٍ  
عَلِمَ الْحَقَّ فَجَارَ مُتَعَمِّدًا فَذَلِكَ فِي النَّارِ ، وَقَاضٍ  
قَضَىٰ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَاسْتَحْيَا أَنْ يَقُولَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ فَهُوَ  
فِي النَّارِ

Hakim terbagitiga golongan: dua golongan masuk neraka, satu golongan masuk surga; Hakim yang bekerja secara benar dalam memutuskan, dia akan berada di surga, Hakim yang tahu akan kebenaran tetapi ia sengaja berbuat zhalim, maka ia akan berada di neraka, dan Hakim yang memutuskan tanpa ilmunya dan dia malu untuk berkata saya tidak tahu, maka ia akan berada di neraka.

- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
يُجَاءُ بِالْقَاضِيِ الْعَدْلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ، فَيُلْقَى مِنْ شِدَّةِ  
الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمَرَةٍ  
قَطٍ .

Dari Aisyah ra ia berkata : Rasulullah Saw bersabda : Akan dibawa Hakim yang adil pada hari kiamat, lalu karena beratnya hisaban, ia berangan-angan bahwasanya dia tidak pernah memutuskan perkara di antara dua orang dalam perkara sebiji kurmapun.

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَاتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بَيْنَهُمَا وَيَعْمَلُ بَيْنَهُمَا

Tidak boleh iri dengki kecuali kepada dua orang : Kepada seseorang yang dianugrahi harta oleh Allah lalu dicurahkan sampai habis dalam membela kebenaran, dan pada seseorang yang dianugerahi Allah hikmah (ilmu yang dalam), lalu ia memutus perkara dengan ilmu itu dan mengamalkannya.

### **3. Dasar-Dasar Peradilan dari Undang-Undang**

#### **1) Pasal 1 ayat 3 UUD 1945**

UUD tersebut merupakan dasar hukum peradilan agama yang berisi tentang kekuasaan Negara yaitu menegaskan bahwa kekuasaan Negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.

#### **2) Pasal 24 ayat 1 UUD 1945**

Tidak hanya UUD 1945 pasal 1 ayat 3 saja, pasal 24 ayat 1 UUD 1945 juga merupakan landasan hukum yang menjadi dasar hukum peradilan agama. UUD ini berisi tentang kekuasaan yang mengaskan bahwa kekuasaan hakim harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

#### **3) Pasal 24 ayat 2 UUD 1945**

Adapun pasal 24 ayat 2 pada UUD 1945 yang juga menjadi dasar hukum peradilan agama. Pasal ini juga berisi tentang kekuasaan peradilan agama dimana ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan oleh MA (mahkamah Agung) dan badan peradilan di bawahnya.

#### 4) Pasal 24 B UUD1945

Dalam pasal 24 B UUD 1945, mengatur bahwa suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan hakim.

#### 5) UU No 14 tahun 1970

Selain UUD 1945, adapun Undang- Undang nomor 14 tahun 1970 yang juga menjadi dasar hukum peradilan agama. Undang- Undang ini berisi tentang ketentuan pokok kekuasaan Hakim terkait dengan peradilan Agama.

### 4. Prinsip Peradilan dalam Islam

#### a. Prinsip menurut al-Qur'an :

##### ▣ 1. PrinsipTauhid

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah: 44)

##### ▣ 2. PrinsipKeadilan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اذْعِلُّوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah : 8)

### ▣ 3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahyi Munkar

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ..

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (Al-Imran : 110)

#### b. Prinsip menurut al-Hadits

- memutuskan berdasarkan bukti-bukti secara lahir :

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى  
الله عليه وسلم : أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أَحْكَمَ بِالظُّوَاهِرِ  
وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ. رواه البخاري ومسلم

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata : Telah bersabda Nabi Saw :  
Tuhanku telah memerintahku untuk memutuskan (perkara)  
berdasarkan (kebenaran) bukti-bukti secara lahir, dan hanya  
Allahlah yang menguasai rahasia-rahasia. HR Bukhori dan  
Muslim.

- prinsip pembuktian :

- الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Pembuktian dibebankan kepada penggugat, sedangkan  
sumpah dibebankan kepada tergugat (yang menolak gugatan).



- prinsip mendamaikan :

- وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Perdamaian dibolehkan di antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram.

- prinsip keramahan dalam memutuskan :

- لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ

Hakim tidak boleh memutuskan (perkara) dalam keadaan marah.

- prinsip berijtihad :

- إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Apabila Hakim berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka dia akan memperoleh dua pahala, dan apabila dia berijtihad tapi ijtihadnya salah, maka akan memperoleh dua pahala.

- Prinsip mendengar kedua belah pihak :

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَسَوْفَ تَذَرِي كَيْفَ تَقْضِي. قال علي رضي الله عنه :  
فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.

Dari Ali ra ia berkata : Rasulullah Saw telah bersabda : Apabila dua orang mengadu kepadamu, janganlah (cepat) memutuskan buat yang pertama (penggugat) sehingga kamu mendengar jawaban yang lain (tergugat), maka kamu akan mengetahui bagaimana cara memutuskannya, Ali ra berkata : Aku senantiasa menjadi qadhi setelah itu.

- Prinsip menurut Risalah Qadha Umar bin Khattab :

- فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مَتَّبَعَةٌ

Sesungguhnya menyelenggarakan peradilan itu adalah suatu ketentuan yang tegas dan suatu tradisi (sunnah) yang diikuti.

- فَافْتَهُمْ إِذَا أُذْلِيَ إِلَيْكَ وَانْقَضَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكْلُمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَازَ لَهُ

Pahamilah (suatu perkara) apabila diajukan kepadamu, karena tidaklah bermanfa'at suatu pembicaraan kebenaran apabila tidak ada penyelesaiannya.

- آسَ النَّاسَ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَيْئَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ

Persamakanlah manusia (para pihak yang berperkara) di dalam majlismu, dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu, sehingga orang mulia tidak tamak akan kecuranganmu, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu.

- الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah dikenakan kepada orang (tergugat) yang mengingkari gugatan.

- الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا  
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Perdamaian itu boleh di kalangan orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal.

- وَمَنْ إِدْعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا  
يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ بَيِّنَةٌ أُعْطِيَتْهُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ أُعْجِزَهُ  
ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَبْلَغُ لِلْعُذْرِ  
وَأَجْلَى لِلْعَمَى

Barang siapa yang menggugat suatu hak yang tidak ada pada tangannya atau suatu bukti, maka berilah ia tempo untuk membuktikannya. Apabila ia bisa membuktikannya, berilah dia haknya, tapi apabila tidak dapat membuktikannya, bolehlah kamu memutuskan yang mengalahkannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keudzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.

- وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءُ قَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَأَجَعْتَ فِيهِ  
رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرَأَجَعَ فِيهِ الْحَقُّ فَإِنَّ  
الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطَلُهُ شَيْءٌ وَمَرَأَجَعَهُ الْحَقُّ خَيْرٌ مِنَ  
الْتِمَادِ فِي الْبَاطِلِ

Suatu putusan yang telah kamu putusan pada hari ini, janganlah sekali-kali dijadikan penghalang untuk meninjau kembali pendapatmu, lalu kamu diberi petunjuk untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun, sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada bergelimbang dalam kebatilan.

- وَالْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَائٍ أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ ,

Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang yang pernah melakukan saksi palsu, orang yang dikenai hukuman had, dan orang yang diragukan perhambaan atau diragukan kekerabatannya, karena Allah Swt. melindungi rahasia-rahasia hamba-Nya dan menghindarkan hukuman had kepada mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah-sumpah.

- ثُمَّ أَلْفَهُمُ أَلْفَهُمْ فِيمَا أُذِلَّى إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَاسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ أَعْمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَ أَشَبَّهَهَا بِالْحَقِّ

Kemudian pahamiilah dengan sungguh-sungguh perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, kemudian bandingkanlah (qiaskanlah) perkara-perkara itu dan kenalilah (perkara) yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pegangilah hukum yang menurut pendapatmu lebih dicintai Allah dan lebih mendekati kebenaran.

- وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَالْقَلْقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذَّى بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ عِنْدَ الْخُصُومَةِ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللَّهُ بِهِ الْأَجَرَ وَيَحْسُنُ بِهِ الذِّكْرُ, فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ

مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ, وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ  
 شَأْنُهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ  
 إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا, فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ فِي  
 عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ

Jauhilah dirimu dari marah, kacau piikiran, gelisah, menyakiti para pihak, bersikap keras ketika menghadapi mereka. Karena memutus perkara di tempat yang benar itu termasuk pekerjaan yang dipahalai Allah dan menjadikan nama baik. Barang siapa mengikhlaskan niatnya demi mencari kebenaran, walaupun merugikan dirinya, maka Allah akan memberinya kecukupan, dan barangsiapa yang berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, pasti Allah akan (membuka rahasia) kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali (amal) yang ikhlas, maka bagaimanakah perkiraanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan, maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya. *Wassalaamu 'alaika."*

Adapun dalam Negara-negara modern melaksanakan kepentingannya dengan menggunakan tiga kekuasaan, yaitu;

1. Kekuasaan perundang-undangan atau *as-sulthoh at-tasyri'iyah* yang berwenang membuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif/*as-sulthoh at-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.
3. Kekuasaan kehakiman/*as-sulthoh al-qodlo'iyah* yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia.

Kita lihat bahwa kekuasaan peradilan/kehakiman itu terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa kedua kekuasaan/lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi/ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan. Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan Islam yang jumlahnya ada delapan (8) yaitu:

a. *Istiqlal al-qodlo'* (kemerdekaan kehakiman)

Kekuasaan kehakiman itu merdeka/berdiri sebagai lembaga kekuasaan tersendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga peradilan agar tidak terkena pengaruh atau dengan kata lain untuk menghindari adanya turut campur dua kekuasaan lain; legislatif dan eksekutif. Ini adalah hal yang bagus dan rasional dalam tatanan hukum. Prinsip ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW hidup.

b. *Al-Musawah amamal qodlo'* (kesamaan di hadapan hukum)

Kebanyakan orang beranggapan bahwa prinsip kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan itu tidak dikenal sebelum meletusnya revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 M. Padahal sebenarnya prinsip itu telah dikemukakan baik dalam al-qur'an, hadits, dan ucapan Khulafa'ur Rosyidin sejak abad ke-7 masehi. Dalam mengadili, Rasulullah SAW selalu bersikap sama di antara pihak yang berselisih. Begitu juga yang dilakukan oleh para khulafa'ur rosyidin.

Amirul mu'minin Umar ibn al-Khatthab r.a pernah memberikan nasehat kepada seorang qodli: "bersikaplah sama di antara manusia di hadapanmu dalam pernyataan dan keputusan. Sehingga orang yang mulia tidak berharap kemenangan perkara dalam keculasanmu, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu."

c. *Majjaniyatul qodlo'* (peradilan gratis)

Di negara-negara Islam, sejak dulu tidak pernah ada qodli yang boleh memungut biaya dari orang yang berperkara ke pengadilan. Hal ini untuk menunjukkan kedermawanan dan tidak adanya sikap tamak dalam diri sang Hakim/*qodli*. Pemerintahan Islamlah yang menggaji mereka (para *qodli*). Prinsip seperti ini tidak dikenal oleh negara-negara eropa kecuali setelah revolusi Prancis. Akan tetapi, dengan adanya prinsip ini bukan berarti orang yang berperkara tidak menyerahkan uang sama sekali ke pengadilan. Undang-undang positif mengharuskan penyerahan sedikit biaya untuk mengurus (administrasi) perkara yang diajukan.

d. *At-taqodli 'ala darojatain aw al-isti'naf* (upaya hukum naik banding).

Berdasarkan prinsip ini, orang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, boleh mengajukan kasus itu lagi ke pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk mendapatkan keputusan hukum lagi atas kasus tersebut. Pengadilan yang lebih tinggi ini mempunyai kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan, apakah keputusan pertama atas kasus itu (hasil pengadilan sebelumnya) dikukuhkan, diganti, atau dibatalkan. Prinsip ini telah dikenal luas dalam semua undang-undang positif. Prinsip ini mempunyai faedah yang penting. Ia mendorong qodli/hakim untuk berhati-hati dan mengerahkan usaha maksimal dalam menangani kasus yang diajukan kepadanya. Karena hakim tersebut tahu bahwa hukum yang ia putuskan akan mungkin ditampakkan/diperlihatkan lagi di kemudian hari (di pengadilan banding), jika ternyata ada kekeliruan dalam keputusannya itu. Sehingga hal ini mendorong sang hakim untuk ber-ijtihad dan melakukan penelitian secara mendalam agar hukum yang ia putuskan tidak diganti atau dianulir.

e. *Al-qodlo' fil Islam yaqumu 'ala nidhomi al-qodli al-fard* (kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal).

Dalam sistem peradilan Islam, yang memutuskan perkara di antara manusia adalah seorang qodli saja. Dalam kondisi ada kebutuhan, Fuqoha' memperbolehkan sang hakim didampingi beberapa Ulama' sebagai pendamping yang akan memberikan sumbangan pendapat pada hakim. Akan tetapi mereka (ulama') tidak boleh ikut campur dalam memutuskan hukum atas kasus yang disidangkan. Pendapat mereka hanya sebagai pertimbangan seperlunya bagi hakim. Jadi yang memutuskan hukum tetap sang hakim/qodli itu sendiri.

f. *'Alaniyatu majlisil qodlo'* (sidang peradilan yang terbuka)

Fuqoha' bersepakat atas terbukanya pengadilan. Bahwa pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Sebagaimana Rasulullah menyelenggarakan persidangan di masjid.

g. *Hushulul ijro'at fi muwajahatil khushum* (mempertemukan pihak yang berselisih)

Keputusan hukum tidak bisa dijatuhkan sebelum kedua belah pihak terkait dipertemukan (saling mengetahui dan mendengarkan pendapatnya masing-masing). Mengenai pihak berperkara yang ghaib (tidak hadir dalam persidangan), ada kaedah-kaedah tersendiri yang mengaturnya, sehingga hak masing-masing pihak tetap terjaga.

h. *Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy* (kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam)

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, walaupun sudah ada undang-undang positif yang diterapkan, fikih (hukum Islam) tetap menjadi pijakan dalam menetapkan, mengganti atau menganulir hukum



## REFERENSI :

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Rosihon A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. X, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet 1, Semarang : PT Pustaka Rizki Puta, 1997.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2003.

## KONDISI PERADILAN PRA ISLAM DI INDONESIA

### A. Sejarah Peradilan Pra Islam

#### 1. Zaman nabi Adam AS

Pada masa Nabi Adam As, baik saat di surga atau setelah beliau dan Siti Hawa turun ke bumi proses peradilannya langsung serta merta dari Allah SWT. hal ini dapat diketahui dari peristiwa pemakanan buah haldi yang kemudian berakibat pula bagi syaitan dengan imbalan kekal di neraka.

Pada masa nabi Adam AS pernah terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil, dimana Nabi Adam yang menjadi hakim dalam penyelesaiannya. Hanya saja bentuk peradilan pada masa tersebut belum dapat dikatakan peradilan seperti yang di kenal sekarang, karena pada saat itu belum dikenal yang namanya hakim dan tugas-tugasnya serta perundang-undangnya.<sup>7</sup>

#### 2. Zaman Nabi Daud as dan Nabi Sulaiman AS

Hakim pertama sekali yang disebut dalam sejarah kemanusiaan adalah Nabi Daud as dan Nabi Sulaiman as. Pada masa mereka dijelaskan bahwa seorang hakim harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara dan harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka. Kedua nabi tersebut masing-masing diuji oleh Allah SWT. Sebagai bukti bahwa tidak sembarang orang yang menjadi hakim.

Sebelum memilih Nabi Daud as. Menjadi hakim. Allah menguji mereka dengan menurunkan dua malaikat yang menyerupai manusia. Keduanya datang saling berselisih dan meminta keadilan kepada Nabi Daud as. Salah satunya berkata, saudara saya ini memiliki 99 ekor kambing betina dan saya memiliki seekor saja. Tapi ketamakkannya menjadikan ia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Lalu ia meminta satu-satunya kambing yang saya miliki. Tapi saya menolak

---

<sup>7</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, 17.

permintaannya, dan saya jelaskan penolakkan penyerahan kambing yang saya miliki. Saya jelaskan kepadanya perbedaan antara, kekayaan ia dan kemiskinan yang menimpa saya. Namun, rekayasanya lebih besar sehingga ia mengalahkan saya dengan kehebatan debatnya sehingga menjadikan saya harus menerima alasannya. Sungguh ia orang yang paling lancar bicaranya, paling kuat debatnya dan paling kaya penjelasannya. Nabi Daud as. melihat bahwa alasan yang dimiliki orang kedua akan berdampak pada kezaliman, maka Nabi Daud as. segera menetapkan putusan dengan mengatakan *"Sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lainnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amat sedikitlah mereka ini"*

Kemudian orang kedua memandang Nabi Daud as dan mengatakan bahwa ini keputusan yang zalim, engkau tidak adil bagaimana engkau memutuskan persengketaan dengan hanya mendengar satu pihak saja. Nabi Dawudpun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengujinya, maka dia meminta ampun kepada-Nya seraya bersungkur sujud dan bertaubat Kemudian dia merenung, merasa takut, dan jiwanya gelisah, sehingga dia mengetahui kelengahan yang diperbuatnya.

Semua itu dikarenakan pandangan kedua orang tersebut mengapa dia tergesa-gesa dalam memberikan keputusan? Dan dia meyakini ia telah melakukan tindakan yang tidak tepat, dan menetapkan suatu hukum tanpa kecermatan, tapi hanya berpedoman kepada apa yang tampak pertama kali Lalu, ia bertanya sebenarnya siapa kedua orang tadi? Kemudian Nabi Dawud mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah malaikat yang diutus Allah SWT untuk menguji Nabi Dawud a.s. kemudian ia bertaubat dan Allah SWT mengampuninya. Lalu turunlah wahyu yang berbunyi: *"Hai Daud. as., sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan*

*kamu dan jalan Allah Swt."*. Itulah peristiwanya yang kemudian dijelaskan Allah Swt. Dalam surat Shad (38): 17-26.

Adapun Nabi Sulaiman a.s. yang hidup dalam didikan ayahnya yaitu Nabi Daud dan memiliki kecerdasan dan pemahaman yang baik yang dianugerahkan Allah SWT sejak kecil. Nabi Sulaiman dalam menyelesaikan masalah (perkara tanaman)

Awalnya perkara ini disampaikan kepada Nabi Daud as. tentang dua orang yang bersengketa. Orang pertama berkata: *"Wahai Nabi sesungguhnya, saya memiliki tanaman yang sedang berbuah dan telah dekat masa petiknya. Namun kambing-kambing orang ini memakan dan merusak tanaman saya tanpa dicegahnya. Maka saya minta keadilan"*. Orang kedua berkata: *"Ya benar saya tak memiliki sanggahan"*. Nabi Daud as. memutuskan agar pemilik tanaman mengambil kambing sebagai ganti kerugian yang dideritanya, dan balasan kecerobohan pemilik kambing.

Namun Sulaiman berkata dan memberi sanggahan atas ayahnya dan ia memutuskan engkau serahkan kambing kepada pemilik ladang, sehingga ia dan keluarganya dapat memanfaatkan susu kambing, bulu, dan anaknya selama beberapa tahun. Sedangkan pemilik kambing mengurus ladang dan mengembalikan tanamannya jadi baru. Hingga ketika tanaman kembali seperti semula, kambing itu pun dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, tidak adayang dirugikan dan tidak adayang diuntungkan. Kisahnya diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya (21) ayat 78-79.

## **B. Sejarah Peradilan Pra Rasulullah SAW**

### **1. Peradilan bangsa Romawi, Persi, dan Mesir Kuno**

Sejarah peradilan telah ada sejak adanya manusia. Begitu juga pada bangsa-bangsa yang telah berkembang dimasa yang lalu, seperti peradilan bagi bangsa Romawi, Persi dan bangsa Mesir kuno. Bangsa ini telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dengan memiliki undang-undang atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh para *qadhi*. Bagi bangsa Israel dan bangsa Arab sebelum Islam berpendapat, bahwa alat-alat bukti dalam peradilan

adalah saksi, sumpah atau keadaan tertangkap basah. Bangsa Barat juga menjelaskan bahwa peradilan di Barat telah mempunyai teknik mengambil keputusan dan alat-alat pembuktian. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya peradilan pada masa ini telah ada walaupun masih sederhana.

Hal yang menjadi perhatian bagi bangsa-bangsa pada masa itu dalam peradilan adalah tentang *qadhi*. Bagi mereka seorang *qadhi* harus mempunyai kemampuan dan baik akhlaknya. Maka tidak akan diangkat seseorang menjadi *qadhi* apabila ia tidak mempunyai kemampuan di bidang ini. Selain itu diperhatikan pula tentang kecerdasannya, kecerdikannya, keluasan ilmunya, ketenangan hatinya, kebersihan jiwanya dan keluhuran budinya.

Selain itu seorang *qadhi* harus diliputi situasi yang dapat menjamin kebebasan dirinya dalam melaksanakan tugasnya yang suci. Semakin tinggi kemajuan bangsa, maka semakin besar pula jaminan-jaminan tersebut dapat diperoleh oleh para *qadhi*. Maka sangat jelas bahwa sejak dulu *qadhi* memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara.

## **2. Peradilan Bangsa Arab pada Masa Jahiliyah**

Bagi masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah pra Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun system peradilan yang mapan. Mereka juga tidak mempunyai *sulthah tasyri'iyah* (badan legislatif) yang menyusun dan membuat undang-undang atau hukum tertentu semacamnya yang dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan persengketaan yang sering terjadi di antara mereka. Karena pada saat itu di jazirah Arab sama sekali tidak terdapat satu kesatuan sosiologis (bangsa) maupun kesatuan politik (negara) secara nyata. Namun mereka telah memiliki *gadhi* untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Mereka pada umumnya berpegang pada tradisi (kebiasaan) dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing kabilah (suku) untuk menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kepala-kepala kabilah memutuskan hukum antara anggota kabilah. Adat-adat kebiasaan itu diambil dari pengalaman atau dari

kepercayaan atau dari bangsa-bangsa yang berdiam di sekitar mereka, seperti bangsa Romawi, Persia, atau dari orang-orang yang berdiam bersama-sama di daerah tersebut yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Hukum balas dendam (*al-akhdzu bi al-tsa'ri*) yang biasa dilakukan oleh suku-suku Arab pra Islam dan menjadi jalan keluar dari kasus-kasus pidana, terutama terkait dengan pidana kematian jiwa, pada kenyataannya justru sering kali menyebabkan semakin runcingnya sebuah persoalan dan berkepanjangan suatu kasus. Hal ini diperkuat dengan adanya realita bahwa pada masa itu masing-masing suku memiliki kecenderungan fanatisme dan solidaritas internal yang sangat kuat terhadap anggota-anggota suku, terutama jika datang dari kalangan bangsawan mereka

Dalam menyelenggarakan peradilan tempat-tempat yang dipakai untuk memutuskan perkara, sidang-sidangnya dapat dilakukan dimana saja. Seperti dilakukan di bawah pepohonan atau kemah-kemah yang didirikan. Peradilan juga pernah dilakukan di pasar kota tempat pengadilan bagi hakim pasar. Amir ibn Zharib duduk untuk memutuskan hokum di depan rumahnya. Sampai akhirnya mereka membangun rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang khusus untuk pengadilan.

Diantara bangunan-bangunan pengadilan yang termasyhur ialah *Darun Nadwah* yang berda di Mekah, dan bangunan itulah yang pertama kali didirikan di sana. Bangunan ini dibangun oleh Qushay bin Ka'ab dan pintunya dihadapkan mengarah ke Ka'bah. Pada permulaan Islam bangunan itu menjadi tempat tinggalnya para Khalifah dan amir-amir di waktu musim haji. Pada pertengahan abad ke III Hijriyah setelah bangunan itu roboh dan goyang, maka Khalifah Mu'tadlid al-Abbasy (281 H) memerintahkan agar bangunan tersebut dihancurkan sama sekali dan memasukkannya ke dalam batas *Al-Masjidil Haram*.

## **C. Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Nabi SAW**

### **1. Rasulullah sebagai Pemegang Otoritas Yurisdiksi**

Berbicara mengenai peradilan islam, tentu tidak terlepas dari masa Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah dakwah kepada penduduk Makkah, terutama masalah aqidah selama 13 tahun. Kondisi umat islam masih lemah, baik dari segi kuantitas maupun kekuatan. Berbagai tekanan dan penindasan terjadi, sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama terutama masalah peradilan, kemudian Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalah dakwahnya.

Berbeda dengan di Makkah, kondisi Madinah relatif stabil dan jumlah umat islam semakin banyak, sementara Rasulullah SAW dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah baik umat islam maupun non-islam, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama dan tuntunan syariah. Permasalahan semakin bertambah di masyarakat terutama masalah muamalah, dan setiap permasalahan yang terjadi senantiasa di hadapkan kepada Rasulullah SAW., dan beliau menyelesaikan permasalahan berdasar apa yang telah di wahyukan oleh Allah SWT kepadanya. Maka dari itu keadilan dipandang sebagai satu elemen yang sangat mendasar dan senantiasa ditegaskan oleh Allah dalam firman Allah SWT yang artinya:

*"Dan hendaklah kamu memutus perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkn kamu dari sebagian apa yang telah diturunkn Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yng telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagaimana dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."*

Tidak ada seorang pun umat Islam selain Rasulullah sendiri yang men-tasyri'-kan hukum pada suatu kejadian, baik untuk dirinya

maupun orang lain. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum islam langsung ditanyakan dan diberi kata putus oleh rasulullah, tidak ada masyarakat yang berani melakukan ijtihad sendiri. Rasulullah memberi fatwa, menyelesaikan persengketaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan kadang dengan legitimasi satu atau beberapa ayat dari Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah, dan kadang-kadang dengan ijtihad Rasulullah yang bersandar kepada ilham dari Allah, atau berdasar pada petunjuk akal batinnya serta penetapan terhadap masalah yang dimaksud. Hukum-hukum yang bersumber dari Rasulullah menjadi undang-undang bagi umat islam yang wajib diikuti. Baik hal tersebut bersumber dari wahyu Allah maupun hasil ijtihad Rasulullah sendiri.

Kehidupan manusia pada setiap masanya selalu membutuhkan peradilan, sebab kalau tidak, maka kehidupan mereka akan menjadi liar. Dengan adanya undang-undang bagi kehidupan masyarakat belumlah cukup untuk menyelamatkan kehidupan sosial dan menertibkannya, karena manusia terkadang berselisih mengenai undang-undang tersebut, bahkan ada yang secara terang-terangan menentang rumusan undang-undang itu atau memungkirinya. Maka peradilanolah yang akan berperan menentukan makna undang-undang dengan secara sempurna.

Fungsi peradilan sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk menyelesaikan dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Pada zaman Nabi SAW proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana.

Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan (qadlā') yang dilakukan oleh Nabi lebih bersifat sebagai "fatwa". dengan model tanya-jawab, dibandingkan dengan proses sebuah "pengadilan" dalam bahasa yang sering dipahami di masa sekarang.

Dihadapan Nabi SAW., kedua belah pihak bebas mengemukakan isi hatinya sehingga masing-masing dapat



mendengarkan pembicaraan pihak lawannya. Alat-alat bukti bagi Nabi adalah pengakuan, saksi, dan sumpah.

Namun meskipun proses peradilan ini berlangsung sangat sederhana, Rasulullah menyatakan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran sebuah keputusan tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil keputusan (qāḍi) mendengarkan pelaporan dari kedua belah pihak.

## **2. Para Hakim di Zaman Rasulullah saw**

Di kota Madinah Rasulullah SAW., menjadi hakim satu-satunya. Namun ketika wilayah kekuasaan Islam meluas, maka Nabi mulai menugaskan para sahabat untuk menjadi gubernur disebagian daerah dan sekaligus sebagai hakim. Mengingat jauhnya tempat yang memerlukan putusan perkara dari kota Madinah. Diantara yang ditugasi beliau adalah Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur sekaligus menjadi Hakim di Yaman, 'Attab bin Asid ditugaskan ke Makkah, Ibn Hajar Al-Asqalani menerangkan, bahwa banyak hadis yang memberi pengertian bahwa tiap-tiap daerah memp[unyai hakim sendiri. Namun Rasulullah SAW sangat teliti dalam memilih atau mengangkat sahabat dalam dalam mengemban tugas sebagai Hakim. Terbukti ketika Mu'az bin Jabal ingin diutus ke Yaman Rasulullah melakukan tes kelayakkannya.

Namun dalam kasus Ali bin Abi Thalib belai mengangkatnya tanpa menguji terlebih dahulu. Ini di karenakan beliau sangat mengetahui kapabilitasnya. Hal-hal yang tidak dapat diputuskan oleh hakim-hakim daerah, disampaikan kepada Rasulullah saw maka Rasul membenarkan purusan-putusan hakim daerah tersebut itu atau membatalkannya. Pada zaman Rasulullah, telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu putusan hukum yang telah dijatuhkan .

## **D. Peradilan Pada Masa Sahabat (Khulafaurasyidin)**

### **1. Masa Khalifah Abu Baqar As-Shidiq**

Sepeninggal Rasulullah SAW pucuk pimpinan pemerintahan Islam digantikan oleh Abu Bakar, ditangan Abu Bakar ini kondisi peradilan Islam tidak banyak mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasul SAW, peperangan melawan Nabi palsu Musailah Al Kadzab, menundukkan kaum pembangkang yang tidak mau menunaikan zakat, serta urusan politik dan pemerintahan yang lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu.

Dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, Abu Bakar selalu melihat isi Al Qur'an, jika ia menemukan hukum Allah di dalam Al Qur'an atas persoalan yang dihadapi maka ia memutuskan perkara dengannya.

Akan tetapi jika tidak ditemukan maka ia mengambil keputusan berdasarkan sunah-sunah Rasul. Jika ia belum menemukan keputusan berdasarkan Al Qur'an dan sunah Rasul, maka Abu Bakar berinisiatif mengumpulkan para sahabat untuk diminta keterangan terhadap perkara yang dihadapi, barangkali ada di antara para sahabat yang mengetahui hukum Rasul terhadap perkara yang di hadapi. Dan manakala tidak bisa diambil keputusan dengan tiga jalan tersebut, maka ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan putusan yang hendak diambil, jika semua yang hadir sependapat untuk menetapkan suatu hukum, maka Abu Bakar berpegang pada keputusan itu. Inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk ijma'.

Salah satu riwayat menyebutkan bahwa pada masa Abu Bakar ini, urusan Qodo' diserahkan kepada Umar Bin Khotob selama dua tahun lamanya, tetapi tidak seorang pun yang datang untuk menyelesaikan suatu perkara, karena para sahabat yang berperkar mengetahui bahwa Umar adalah seorang yang sangat tegas. Dan juga karena faktor pribadi pribadi kaum muslimin pada masa itu yang dikenal sangat saleh dan toleran terhadap sesama

muslim, sehingga faktor inilah yang sangat membantu tidak terwujudnya selisih sengketa di antara mereka.<sup>8</sup>

## **2. Masa Khalifah Umar bin Khatab**

Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, terjadi perkembangan baru di bidang peradilan. Khalifah Umar memisahkan antara kekuasaan peradilan (yudikatif) dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif), hal ini dipengaruhi oleh semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, semakin banyaknya beban-beban yang menyangkut bidang peradilan, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintahan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, keharusan peningkatan perhatian dalam urusan pemerintahan di daerah-daerah, serta telah berbagai corak ragamnya dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat. Maka khalifah Umar Bin Khatab mengangkat Abu Darda' sebagai qodji' di Madinah, dan Syuraih Bin Qais Bin Abil Ash di Mesir, Abu Musa Al Asy'ari di Kuffah, sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri.

Menurut kitab *Tarikhul Islam*, Abu Musa menjadi hakim di masa Umar hanya untuk Bashrah saja, sedang pengadilan di Kufah diserahkan kepada Syuraih. Di masa Usman barulah Abu Musa menjadi hakim di Kufah. Oleh karena tugas peradilan sebagian dari kewenangan umum itu, maka kepala negaralah yang memegang wewenang ini dan dialah yang mengangkat para hakim untuk perkara-perkara khusus. Karena itulah diwaktu Umar mengangkat beberapa orang menjadi hakim, beliau membatasi wewenang mereka dalam perkara-perkara perdata saja, perkara perkara pidana dipegang sendiri oleh khalifah, atau oleh penguasa daerah. Para khalifah senantiasa mengawasi perbuatan para penguasa daerah dan hakimnya. Serta terus-menerus memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Ridha, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Jawa Tengah : STAIN Kudus, 2015, 26.

### **3. Masa Khalifah Utman bin Affan dan Ali bin Abhi Thalib**

Ustman adalah khalifah yang mula-mula membangun gedung pengadilan, yang di masa Abu Bakar dan Umar masjidlah yang dijadikan sebagai tempat pengadilan. Demikian juga, di masa khlifah-khalifah ini telah ditertibkan gaji bagi pejabat-pejabat peradilan dengan diambilkan dari kas baitul maal yang mula-mula dirintis di masa khalifah Abu Bakar ra. Demikian pula khalifah Ali Bin Abi Thalib mengangkat Abu Nakhai sebagai gubernur di Ustur dan Mesir dengan peran perannya, agar ia bertaqwa kepada Allah dan agar hatinya diliputi rasa kasih sayang dan kecintaan kepada rakyat, dan agar bermusyawarah dan memilih penasihat-penasihat, serta dijelaskannya tentang siasat pemerintahan.

Di dalam masa Khulafa' Rasyidin, belum diadakan panitera dan buku register untuk mencatat putusan-putusan yang telah dilakukan, hal ini disebabkan karena qhodi'lah yang melaksanakan sendiri segala keputusan yang dikeluarkannya. Pada masa itu, hakim di samping bertindak sebagai pemutus perkara, juga bertindak sebagai pelaksana hukum agar dijalani. Kebanyakan hakim pada masa itu duduk di rumahnya sendiri menerima dan memutuskan perkara, karena pada masa itu qhodi' belum memiliki tempat khusus (gedung pengadilan).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, masjidlah yang dijadikan tempat untuk menyelesaikan segala sengketa, karena masjid-masjid pada masa itu tidak hanya khusus untuk tempat bersembahyang, yang memang demikian sebenarnya fungsi masjid. Ia merupakan pusat bagi memecahkan segala urusan sosial seperti peradilan, bahkan merupakan kantor pusat pemeritahan, dan juga sebagai tempat perguruan tinggi.<sup>9</sup>

#### **E. Peradilan Pada Masa Bani Umayyah**

Perkembangan peradilan pada masa bani Umayah menunjukkan perubahan, di mana khalifah mempunyai peranan besar

---

<sup>9</sup> Ahmad Ridha, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Jawa Tengah : STAIN Kudus, 2015, 22-23.

karena ia mengangkat para hakim di ibukota pemerintahan, sedang untuk hakim di daerah diangkat oleh gubernur. Akan tetapi masing-masing hakim itu tidak mempunyai hak untuk mengawasi putusan-putusan hakim yang lain. Hakim ibu negara sendiri tidak bisa membatalkan putusan hakim daerah. Kekuasaan pembatalan putusan hakim itu hanya dipegang oleh khalifah sendiri atau wakilnya.

Tugas para hakim di masa itu hanyalah mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Tentang pelaksanaan hukuman, maka kadang-kadang diawasi sendiri oleh hakim atau diawasi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh hakim. Peradilan di masa bani Umayyah mempunyai dua ciri khas yaitu:

- a. Hakim memutuskan perkara berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri, hakim pada umumnya adalah seorang mujtahid. Sehingga tidak ada qodi' yang memegang suatu pendapat tertentu, tetapi ia memutus perkara yang tidak ada ketentuan nashnya dari Al Qur'an atau sunah Nabi SAW. Atau ijma' dengan pendapat dan ijtihadnya sendiri, dan apabila ia menemukan kesulitan dalam menentukan hukumnya, maka ia meminta bantuan ahli-ahli fiqh yang berada di kota itu. Dan banyak di antara mereka berkonsultasi dengan pemerintah atau penguasa dalam mencari suatu ketentuan pendapat.
- b. Lembaga peradilan pada masa itu tidak dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna. Oleh karena itu qodi'-qodi' pada masa itu keputusan-keputusan hukumnya tidak dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan pribadi, sehingga keputusan mereka itu benar benar berwibawa, meskipun terhadap para penguasa itu sendiri. Putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa sendiri. Dari sudut lain, khalifah sendiri selalu mengawasi keputusan yang mereka keluarkan, di samping adanya pemecatan bagi siapa yang berani melakukan penyelewengan.

## **F. Peradilan Pada Masa Bani Abbasiyah dan Sesudahnya**

Di masa bani Abbas ini, peradaban telah semakin meluas, dan berbagai kasus telah terjadi akibat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perekonomian dan kemasyarakatan, maka membawa akibat pula saling berselisih dan berbeda pendapat antara ahli-ahli fiqh, dan timbullah mazhab-mazhab sehingga timbul pula taqlid, yang hal ini mempengaruhi juga terhadap keputusan-keputusan qodi' di antara perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini adalah:

- Lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum, lantaran telah berkembang mazhab empat. Karenanya, hakim diminta memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa, atau oleh masyarakat setempat. Di Iraq hakim memutuskan perkara dengan mazhab Abu Hanifah, di Syam dan Mghribi hakim memutuskan perkara dengan mazhab Malik, dan di Mesir dengan mazhab Syafi'i. Dan apabila dua yang berperkara yang bukan dari pengikut mazhab yang termasyhur di negeri itu, maka ditunjuklah seorang qodi' yang akan memutus perkara itu sesuai dengan mazhab yang diikuti kedua belah pihak yang berperkara.
- Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam masa ini ada sebagian khalifah Abbasiyah yang ikut campur dalam penanganan perkara oleh qodi', sehingga hal ini menyebabkan menjauhnya fuqoha' dari jabatan ini (hakim).
- Lahirnya istilah atau kedudukan Qodi' Al Qudot, lembaga tersebut berhak mengangkat dan melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas hakim, kekuasaan peradilan semakin meluas meliputi kekuasaan kepolisian, kepegawaian, baitul maal, dan mata uang. Qodi' qudot ini berkedudukan di ibukota negara. Dialah yang mengangkat hakim-hakim di daerah. Qodi' qudot yang pertama ialah Al Qodi' Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim, penyusun kitab Al Kharaj. Hal ini terjadi di masa Harun Al Rasyid, yang memang sangat memuliakan Abu Yusuf dan memperhatikan keadaan hakim-hakim.

Pada masa ini barulah peradilan disusun menjadi instansi tersendiri, dengan ini maka hakim hakim itu mempunyai daerah-daerah tertentu di bawah pengawasan Qodi' qudho yang mengatur lembaga peradilan ini. Kemudian di waktu daerah-daerah Islam satu demi satu melepaskan diri dari pemerintahan Baghdad, maka di tiap-tiap daerah itu diangkat pula Qodi' qudot.

Kewenangan hakim di masa ini di samping memperhatikan urusan-urusan perdata, juga menyelesaikan urusan-urusan waqaf dan menunjukkan kurator untuk anak-anak yang di bawah umur. Bahkan kadang-kadang hakim-hakim ini juga menangani urusan-urusan kepolisian, penganiayaan yang dilakukan penguasa, qishas, hisbah, pemalsuan mata uang dan baitul maal.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000, 41.

## **REFERENSI :**

Ahmad Ridha, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Jawa Tengah : STAIN Kudus.

Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.



## **PERADILAN ISLAM PADA MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA**

Sebagai negara yang menamakan dirinya dengan sebutan negara hukum, pembahasan mengenai peradilan itu sangat penting karena proses penegakkan hukum berada dalam lingkup pengadilan. Sebenarnya peradilan ini telah dilakukan sebelum datangnya Islam. Ketika itu keputusan suatu perkara hukum dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, bahkan kebenaran hanya berada ada pihak yang lebih kuat.

Semakin berkembangnya pemikiran masyarakat Nusantara pada saat itu, maka keinginan untuk bertindak main hakim sendiri semakin berkurang karena dipandang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keteraturan tatacara pergaulan hidup mereka memberikan pemahaman bahwa harus ada seseorang yang berhak memberikan keputusan, apabila terjadi perselisihan atau bentrokan kepentingan diantara anggota masyarakat pada saat itu atau dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran aturan. Maka, itulah awal terjadinya peradilan pada masyarakat dahulu yang dikenal dengan *Peradilan Pradata* dan *Peradilan Padu*.

Kemudian Islam datang dengan menyebarkan ajaran-ajarannya melalui perdagangan yang dilakukan oleh para dai. Ketika itu, pengenalan kasta dalam masyarakat Nusantara mulai berkurang karena Islam mengajarkan penyetaraan kalangan masyarakat. Sehingga dari penyebaran inilah Islam mudah diterima oleh Nusantara dan menyebar dengan pesat. Maka pengaruh ajaran Hindu pun semakin menyusut dengan meningkatnya ajaran Islam dalam berbagai aspek. Dan peradilan pun mengalami berbagai perubahan, baik dari segi bentuk maupun sistemnya.

### **A. Sejarah, Bentuk, dan Sistem Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Islam**

Suatu perkiraan yang dapat dijadikan pegangan sementara bahwa Sejarah Peradilan Agama di Indonesia berkaitan erat dengan sejarah masuknya agama Islam di wilayah Nusantara. Dan sejarah

peradilan pada masa kesultanan dimulai sejak masuknya agama Islam di nusantara. Perihal tentang kapan masuknya Islam ke Nusantara terdapat beberapa pendapat, diantaranya ada yang mengatakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh Masehi, sedangkan pendapat lain mengatakan masuknya Islam ke Tanah Air pada abad ketujuh Hijriyah atau ke-13 Masehi.<sup>11</sup>

Adapun hasil seminar tentang Masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 1963 menyimpulkan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia yang untuk pertama kali pada abad pertama Hijriyah atau bertepatan dengan abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Mekkah dan Madinah yang sekaligus sebagai mubalig.

Dapat diperkirakan bahwa pada saat-saat itu masyarakat pemeluk agama Islam telah mengenal hukum Islam walaupun masih dalam tahap permulaan. Setelah melalui proses yang panjang, berdirilah kesultanan/Kerajaan Islam Samudera Pasai di pesisir timur Sumatera dan meluas ke pantai utara pulau Jawa. Menurut Bagir Manan, lembaga Peradilan Agama telah ada dan tumbuh bersamaan dengan berkembangnya kekuasaan Islam di Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya Peradilan Agama itu adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum sesuai dengan keyakinan mereka.<sup>12</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu amat bergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama bebas dari kalangan pesantren; dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu, terlihat dalam susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum, dan sumber

---

<sup>11</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, 22.

<sup>12</sup> Nurlailatul Musyafa'ah, Aos Sutisna, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Pustaka Quraisy, 2004, 4.

pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya.<sup>13</sup>

Menurut Mr. R. Tresna, jauh sebelum Islam datang bahwa tata hukum di Indonesia dipengaruhi oleh peradaban Hindu. Akan tetapi, pengaruh itu tidak sampai menghalangi pertumbuhan hukum Indonesia asli, tetap menjadi dasar pegangan di dalam kehidupan rakyat Nusantara. Pengaruh ini terlihat dari adanya garis pemisahan di antara peradilan raja atau *Peradilan Pradata* dengan peradilan yang dilaksanakan pejabat-pejabat tertentu atau *Peradilan Padu*.<sup>14</sup> Mengenai pemisahan di antara perkara *Pradata* dan perkara *Padu* ini tidak bersifat mutlak. Ada kalanya, bahwa suatu perkara yang biasanya termasuk perkara *Padu*, di dalam keadaan tertentu menjadi berubah sifatnya, yaitu dianggap seperti perkara *Pradata*, maka harus diadili oleh pengadilan raja. Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum *pradata*, tetapi juga memasukkan pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islam telah menyebar di kalangan para penganutnya terutama hukum keluarga. Hal itulah yang mempengaruhi terhadap proses pembentukan dan pengembangan Peradilan Agama di Indonesia.<sup>15</sup>

Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram (1613-1645), *Pengadilan Pradata* menjadi *Pengadilan Surambi*, yang dilaksanakan di serambi mesjid. Pemimpin pengadilan, meskipun prinsipnya masih tetap di tangan sultan, telah beralih ke tangan penghulu yang didampingi beberapa orang ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Keputusan *Pengadilan Surambi* berfungsi sebagai nasihat bagi Sultan dalam mengambil

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003, 113.

<sup>14</sup> R.Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978, 14.

<sup>15</sup> Nurlailatul Musyafa'ah, Aos Sutisna, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Pustaka Quraisy, 2004, 5.

keputusan. Dan Sultan, tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat *Pengadilan Surambi*. Pada masa kekuasaan Sultan Agung, beliau merubah sistem Peradilan yang ada dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran di bawah pengaruh Islam. Sultan Agung mewujudkannya khusus dalam Pengadilan *Pradata* yakni dengan cara memasukkan orang-orang dari kalangan Islam ke dalam Peradilan *Pradata*. Setelah Mataram terpecah menjadi dua wilayah yakni Jogjakarta dan Surakarta, Kumpeni lebih turut campur dalam urusan Peradilan di kedua negara itu. Ketika Sultan Agung mengadakan perubahan di dalam tata-Pengadilan di Mataram maka dengan sendirinya perubahan itu dilakukan pula di tanah Priangan. Tata-usaha Pengadilan di Priangan diatur menurut tata-usaha Pengadilan di Mataram. Akan tetapi ini hanya mengenai perkara *Padu* saja, perkara-perkara yang termasuk perkara *Pradata* harus dikirimkan ke Mataram.

Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, *Pengadilan Pradata* dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan; dan raja sendiri yang menjadi tampuk pimpinannya. Namun dalam perkembangan berikutnya *Pengadilan Surambi* masih menunjukkan keberadaannya sampai dengan masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan. Pada tahun 1677 adalah suatu tahun dimana kekuasaan Mataram mulai jatuh dari yang awalnya Mataram adalah sebuah negara yang berdaulat penuh atas semua kekuasaan Peradilan. Pada saat itu, Kumpeni mulai masuk dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap negara Mataram.

Meskipun Kesultanan Cirebon didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Kesultanan Banten, akan tetapi lapisan atas dari penduduk Cirebon, yang berasal dari Demak, masih kokoh terikat kepada norma-norma hukum dan adat kebiasaan Jawa-Kuno. Perbedaan itu tampak dalam tata peradilan di kedua kesultanan itu. Adapun pengadilan di Banten disusun menurut pengertian Islam. Sedangkan pada masa Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan

pengaruh Hukum Hindu sudah tidak lagi berbekas karena di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh *qadhi* sebagai hakim tunggal. Namun di Cirebon, pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang menteri itu diputuskan menurut undang-undang Jawa. Kitab hukum yang digunakan, yaitu *Papakem Cirebon*, yang merupakan kumpulan macam-macam hukum Jawa-Kuno, memuat kitab hukum Raja Niscaya, Undang-undang Mataram, Jaya Lengkar, Kontra Menawa, dan Adilullah. Namun demikian, satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ke dalam *Papakem Cirebon* itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.<sup>16</sup>

Di beberapa tempat, seperti di Kalimantan Selatan dan Timur, Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lain, para hakim biasanya diangkat oleh penguasa setempat. Di daerah-daerah lain, seperti di Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan tidak ada kedudukan tersendiri bagi pengadilan Agama. Tetapi pejabat agama langsung melaksanakan tugas-tugas pengadilan.<sup>17</sup>

Menurut Cik Hasan Bisri, adanya berbagai ragam pengadilan itu, menunjukkan posisi yang sama, yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan raja atau sultan. Di samping itu, pada dasarnya batasan wewenang pengadilan agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing. Pengintegrasian, atau hidup berdampingan antara adat dan syara', merupakan penyelesaian konflik yang terjadi secara laten bahkan manifest, sebagaimana terjadi di Aceh, Minangkabau, dan di beberapa tempat di Sulawesi Selatan. Kedudukan sultan sebagai penguasa tertinggi, dalam berbagai hal, berfungsi sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003, 114-117.

<sup>17</sup> Nurlailatul Musyafa'ah, Aos Sutisna, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Pustaka Quraissy, 2004, 7.

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003, 113-117.

## B. Periode Perkembangan Pembentukan Peradilan

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lembaga yang sangat tua, sehingga dalam sejarahnya yang panjang, peradilan mengalami berbagai pasang surut. Dan menurut Cik Hasan Bisri, pada mulanya ia diorganisasikan secara sederhana, kemudian menjadi salah satu pelaksana kekuasaan pemerintah dalam bentuk dan wewenang yang beraneka ragam. Ia mengalami perkembangan yang pesat dalam struktur, kekuasaan, dan prosedurnya. Posisinya pun semakin penting, terutama dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pada masa kesultanan ini atau bisa juga dengan sebutan masa pra pemerintahan Hindia Belanda, sebagaimana perkembangannya terdapat tiga priode pembentukan peradilan, yaitu:

### 1. Tahkim kepada Muhakam

Ketika pemeluk agama Islam masih sedikit, wujud peradilan agama belum seperti sekarang ini, pada masa itu bila terjadi perselisihan atau sengketa, di antara anggota masyarakat, diselesaikan dengan cara *bertahkim*, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama. Dalam masa-masa permulaan Islam datang di Indonesia, ketika pemeluk agama Islam hidup di dalam masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal ajaran Islam, jika terjadi sengketa antara pemeluk agama Islam mereka menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan keislaman yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa. Yaitu kepada guru atau mubalig yang dianggap mampu dan berilmu agama. Orang yang bertindak sebagai hakim disebut *muhakam*.<sup>19</sup>

### 2. Ahlul Hilli Wal 'Aqdi

Ketika penganut agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau *qadhi* dilakukan secara pemilihan dan

---

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003, 116.

bai'at oleh *ahlul hilli wal'aqdi*, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Tauliyah

Ketika kelompok masyarakat Islam telah berkembang menjadi kerajaan Islam, Pengangkatan jabatan hakim (*Qadhi*) dilakukan dengan pemberian "tauliyah", yaitu pemberian atau pendelegasian kekuasaan dari penguasa. Pada masa itu terdapat bermacam-macam sebutan atau nama, antara lain sebagai berikut:

- a. Di Aceh dengan nama *Mahkamah Syar'iyah Jeumpa*;
- b. Di Sumatera Utara dengan nama *Mahkamah Majelis Syara'*;
- c. Di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam, lebih disukai istilah "*Hakim Syara'*";
- d. Di Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al Banjari, *Kerapatan Qadhi Kerapatan* dan *Qadhi Besar*;
- e. Di Sumbawa Hakim Syara', di Sumatera Barat nama Mahkamah Tuan Qadhi atau Angku Kali;
- f. Di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara';
- g. Di Kerajaan Mataram dengan *Pengadilan Surambi*.

---

<sup>20</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, 23.

## REFERENSI :

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Nurlailatul Musyafa'ah, Aos Sutisna, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Pustaka Quraissy, 2004.

R.Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978.

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.



## **HUBUNGAN KEKUASAAN POLITIK DAN POLITIK HUKUM PADA MASA PENJAJAHAN**

Berbicara tentang peradilan agama di Indonesia tidak akan lepas dari sejarah yang melatar belakangnya, ada empat produk hukum yang mempengaruhi berlakunya hukum di Indonesia, yaitu hukum adat masyarakat asli sebagai warga pribumi, hukum Eropa daratan (kontinental) yang dikenal dengan *civil law*, hukum Eropa kepulauan yang dikenal dengan nama *common law* atau *Anglo Saxon* yang dibawa oleh penjajah Belanda, serta hukum Islam sebagai produk pemahaman Islam yang dipopulerkan oleh penduduk muslim Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan Islam.

Peradilan Islam dalam sejarahnya mengalami pasang surut, itu mungkin tidak lepas dari kenyataan adanya beberapa produk hukum yang berbeda yang saling mengambil tempat untuk bisa eksis dan diaplikasikan di Indonesia oleh masing-masing penggagasnya, keadaan sosial masyarakat, sistem pemerintahan yang sedang berkuasa, sangat mempengaruhi perkembangan Peradilan Islam di Indonesia.

Hal-hal tersebut bisa terlihat dari potret sejarah perjalanan Peradilan agama. Penulis menilai ini sangat menarik sekali untuk dikaji karena akan memberikan gambaran kepada kita faktor-faktor yang mempengaruhi pasang surut perjalanan Peradilan Agama di Indonesia, sehingga mungkin akan menumbuhkan sikap tertentu dan paradigma baru yang akan membawa kepada masa depan Peradilan Agama yang lebih baik lagi, karena bagaimanapun juga ini merupakan salah satu simbol kebesaran Islam yang ada di Indonesia.

### **A. Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda**

Dalam memahami potret perjalanan peradilan agama di Indonesia pada masa penjajahan, dapat di klasifikasi menjadi beberapa periode, yaitu era sebelum tahun 1882 pada masa kerajaan-

kerajaan dan awal pendudukan belanda dan masa setelah belanda melancarkan politik hukum, setelah tahun 1882 sampai sekitar tahun 1937, dari sekitar tahun 1937 sampai pendudukan jepang, dan era setelah pendudukan jepang sampai Indonesia merdeka. Berikut ini akan dipaparkan secara detail perjalanan peradilan agama dalam periode-periode tersebut.

### **a. Sebelum Tahun 1882 (Masa Transisi)**

Sebelum belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia,<sup>21</sup> hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing, dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan.

Masyarakat pada masa kerajaan sampai awal kolonial belanda berkuasa dengan rela dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun, keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme barat yang membawa misi tertrentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan sampai misi kristenisasi.<sup>22</sup>

Peradilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "pengadilan serambi". Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Pada

---

<sup>21</sup> M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996, 7.

<sup>22</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000, 43.

masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, para ulama yang memegang kekuasaan dalam Peradilan Agama merupakan penghulu kraton yang mengurus keagamaan islam dalam semua aspek kehidupan. Kewenangan Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh pihak keraton tersebut sangat luas mencakup perbagai permasalahan kemasyarakatan dan kerajaan.

Eksistensi Peradilan Agama yang di praktekkan tersebut merupakan bukti bahwa hukum Islam telah mampu melebur dengan hukum adat Indonesia, dan justru lebih bisa di terima oleh masyarakat. Hal ini tentu tidak terlepas dari keadaan sosial masyarakat saat itu yang mayoritasnya sudah memeluk agama Islam, selain itu kekuasaan pemerintahan kerajaan juga sangat mendukung aktifnya Peradilan Agama.

Setelah Belanda datang ke Indonesia dan mulai menjajah, dengan VOC yang merupakan badan persatuan pedagang yang sekaligus berfungsi sebagai badan pemerintahan mereka di Indonesia, keadaan sedikit berubah, mereka berusaha mengikis eksistensi Peradilan Agama yang dipraktekan oleh warga pribumi melalui kebijakan-kebijakan mereka, pada tanggal 4 maret 1620 mereka mengeluarkan instruksi agar di semua daerah yang dikuasai VOC harus diberlakukan Hukum Sipil Belanda.<sup>23</sup> usaha mereka ini tidak berhasil karena tidak diterima oleh masyarakat, dan bahkan mereka banyak yang melakukan perlawanan.

Pada tanggal 25 mei 1760 berlakunya Hukum Islam di akui oleh VOC melalui *Resolutie der Indische Regeling*, yaitu berupa kumpulan aturan Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan mebnurut Hukum Islam.<sup>24</sup>

Hal ini mngkin disebabkan karena sistem pemerintahan Belanda belum kuat kekuasaannya, dan juga idealisme serta fanatisme

---

<sup>23</sup> Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, 25.

<sup>24</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000, 26.

keberagamaan masyarakat Indonesia pada saat itu yang sangat kuat sekali, sehingga upaya pemerintah Belanda untuk menekan Peradilan Agama dan memasukkan hukum Eropa kurang berjalan lancar.

Kemudian pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) Pengadilan Agama belum berdiri sendiri sebagai lembaga independen, meskipun demikian untuk daerah Banten, daendels membiarkan adanya Pengadilan Penghulu yang dapat praktik memutuskan perkara-perkara kekeluargaan menurut hukum Islam. Di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, walaupun tidak ada Pengadilan Agama di setiap *landgerecht* diikuti sertakan seorang penghulu yang akan ikut memberikan pertimbangan bila ketua (bupati) *Landor* beserta anggota akan memutuskan perkara./ untuk setiap *vredesqerecht* di Jawa Tengah dan Jawa Timur diangkat seorang penghulu sebagai anggota dan *vredesqerecht* ini akan memutuskan perkara-perkara kecil misalnya perselisihan-perselisihan dalam perkawinan, penganiayaan, utang piutang, dan sebagainya.

Seperti halnya VOC, Daendels menganggap hukum adat Jawa yang terdiri dari hukum Islam adalah lebih rendah derajatnya dari hukum Eropa, oleh karena itu tidak cukup baik untuk orang Eropa. Hal ini tampak jelas ketika terjadi seorang Eropa melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang Jawa asli, maka yang berhak untuk mengadili mereka adalah *Raad van Justitie* dan hukum materil yang diterapkan adalah hukum Eropa.

Pada tahun 1830 pemerintahan Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan "*landraad*" (pengadilan negeri). Hanya lembaga *landraad* yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dalam bentuk "*executoire verklaring*" (pelaksanaan putusan), Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang.

Dapat disimpulkan bahwa potret peradilan agama pada awal penjajahan Belanda sudah beroperasi secara maksimal, diakui dan diterapkan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia, walaupun belum diakui sebagai lembaga resmi yang independen oleh Belanda. hal ini

bisa terjadi karena memang pengaruh Islam kuat sekali, kemudian pengakuan dan legitimasi yang diberikan oleh penguasa juga sangat mendorong berdirinya peradilan agama dan diakui keberadaannya serta aktualisasinya. Ini sesuai dengan teori *living law* dan teori hukum ketatanegaraan. Peradilan Agama pada mulanya masih eksis dan memiliki peran penting pada masa awal penjajahan belanda, ini karena sesuai dengan teori *living law* hukum yang hidup di masyarakat dan yang mempengaruhi pola pikir mereka adalah hukum Islam, namun ketika belanda berkuasa dan melancarkan politik hukumnya, peradilan agama dengan hukum Islam yang diusungnya bersinggungan dengan hukum Eropa dan hukum adat, ketika terjadi gap semacam ini maka kebijakan penguasalah yang paling menentukan, pemerintah belanda dalam hal ini ingin menyingkirkan peradilan agama walaupun masyarakat mayoritas muslim, ini tentunya tidak lepas dari pertimbangan politik dari mereka, seperti terancamnya kekuasaan, ketakutan akan fanatisme yang berlebihan dari rakyat jajahan, dsb.<sup>25</sup>

#### **b. Sesudah Tahun 1882 sampai Tahun 1937 (Pemerintahan Belanda I)**

Setelah masa Daendels sekitar tahun 1845, banyak ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda mengakui bahwa dikalangan masyarakat Indonesia Islam merupakan agama yang sangat dijunjung tinggi oleh pemeluknya. Penyelesaian masalah kemasyarakatan senantiasa merujuk kepada ajaran agama Islam, baik itu soal ibadah, politik, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya. Atas fenomena ini, maka para pakar hukum Belanda berkeyakinan bahwa ditengah-tengah komunitas itu berlaku hukum Islam, termasuk dalam mengurus peradilan pun diberlakukan undang-undang agama Islam.

Bukti Hindia Belanda secara tegas mengakui bahwa UU Islam (hukum Islam) berlaku bagi orang Indonesia yang bergama Islam. Pengakuan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>25</sup> Jazuni, *legislasi Hukum Nasional di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Bakti, 2005, 176-177.

tertulis pada 78 *reglement op de beliedder regeerings van nederlandsch indie* disingkat dengan *regreeings reglement* (RR) staatsblad tahun 1854 No. 129 dan staatsblad tahun 1855 No. 2. Peraturan ini secara mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia yang notabenenya beragama Islam.

Pasal 78 RR berbunyi: “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut UU agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka”.

Lahirnya firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 152 telah mengubah susunan dan status Peradilan Agama. serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, ini adalah merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi Peradilan Agama, dengan adanya Staatsblad 1882 no.152 yang di keluarkan pada tanggal 1 Agustus 1882 ini,<sup>26</sup> maka secara yuridis formal Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia.

Adapun wewenang Pengadilan Agama yang disebut dengan "*preisterraacf*", menurut Noto Susanto (1963: 7) perkara-perkara itu umumnya meliputi : pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, waqaf, shadaqah, dan baitul mal, yang semuanya erat dengan agama Islam,

Staatsblad 1882 no.152 berisi tujuh pasal yang maksudnya adalah sebagai berikut:

#### Pasal 1

Disamping setiap *landraad* (pengadilan negeri) di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama, yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *landraad*.

---

<sup>26</sup> Basic Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2010, 48.

## Pasal 2

Pengadilan Agama terdiri atas; penghulu yang diperbantukan kepada landroad sebagai ketua. Sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/residen.

## Pasal 3

Pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan putusan, kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga anggota termasuk ketua. Kalau suara sama banyak, maka suara ketua yang menentukan.

## Pasal 4

Putusan pengadilan agama dituliskan dengandisertai dengan alasan-alasannya yang singkat, juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang turut memberi keputusan. Dalam berperkara itu disebutkan pula ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara.

## Pasal 5

Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua.

## Pasal 6

Keputusan pengadilan agama harus dimuat dalam suatu daftar dan harus diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (visum) dan pengukuhan

## Pasal 7

Keputusan pengadilan agama yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat (2), (3), dan (4) tidak dapat dinyatakan berlaku

Selain Peradilan Agama pada saat itu terdapat lima buah tatanan peradilan, yaitu :

- a. Peradilan Gubernemen, tersebar di seluruh daerah Hindia-Belanda

- b. Peradilan Pribumi, tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu di Karesidenan Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Timur, Manado dan Sulawesi, Maluku, dan di pulau Lombok dari Karesidenan Bali dan Lombok.
- c. Peradilan Swapraja, tersebar hamper di seluruh daerah swapraja, kecuali di Pakualaman dan Pontianak.
- d. Peradilan Agama, tersebar di daerah-daerah tempat Peradilan Gubernemen, di daerah-daerah dan menjadi bagian dari Peradilan Pribumi, atau di daerah-daerah swapraja dan menjadi bagian dari peradilan swapraja.
- e. Peradilan Desa, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen. Disamping itu ada juga Peradilan Desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.

Pengakuan hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum sarjana barat L.W.C. Van De Berg, dia sebagai penasehat kerajaan Belanda adalah konseptor Staatblad 1882 no.152.<sup>27</sup>

Dia mengemukakan sebuah teori yang disebut teori "*receptio in complexu*", Teori ini digagas oleh Salomon Keyzer yang belakangan dikaitkan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1854-1927). Maksud teori ini, adalah "hukum mengikat agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Dengan kata lain teori ini menyebut bagi rakyat pribumi yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya, walaupun terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya".

Teori ini diangkat dari kenyataan yang menunjukkan bahwa sebelum VOC berkuasa di Indonesia banyak kerajaan-kerajaan tersebut diterapkan norma-norma Hukum Islam. Kerajaan-kerajaan yang memberlakukan Hukum Islam antara lain kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Cirebon, Banten, Ternate, Kesultanan Buton, Sumbawa, Kalimantan Selatan, Kutai,

---

<sup>27</sup> Mushofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2005, 15.



Pontianak, Surakarta, dan Palembang. Di Wilayah kerajaan tersebut diberlakukan Hukum Islam dan ada lembaga peradilan agama, dengan pertimbangan ini maka sudah seharusnya Peradilan Agama ada, termasuk juga di Batavia yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda.<sup>28</sup>

### **c. Setelah tahun 1937 (Pemerintahan Hindia Belanda II)**

Teori *Receptio In Complexu* yang dikemukakan Van De Berg yang melatar belakangi munculnya *stanblaad* tahun 1882 no.153 mendapat kritikan tajam oleh Snouck Horgronje karena teori *Receptio In Complexu* bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah Hindia Belanda, dan akhirnya dia mengemukakan teori *Receptio*.

Menurut teori *Receptio* dinyatakan “hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat”. Maka dari itu sudah selayaknya jika diterapkan adanya kebijakan bahwa hukum Islam bisa diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat.<sup>29</sup>

Pada tahun 1937 munculah *Staatsblad* 1937 Nomor 116, dengan *stanblaad* ini berarti telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada pengadilan negeri, mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain diseluruh Indonesia.

---

<sup>28</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2010, 47.

<sup>29</sup> Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, 28-29.

Wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan baru pasal 2a Staatblad 1837 meliputi perkara-perkara sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Perselisihan antar suami istri yang beragama Islam
- b. Perkara-perkara tentang : a. nikah, b. talak, c. rujuk, dan d. perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama islam
- c. Menyelenggarakan perceraian
- d. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (*ta'liq al thalaq*) telah ada.
- e. Perkara mahar atau mas kawin.
- f. Perkara tentang keperluan kehidupan isteri yang wajib diadakan oleh suami.

Teori receptio bertujuan untuk mengetahui peranan hukum Islam dengan mengedepankan hukum adat atau bahkan mengganti hukum Islam dengan hukum adat. Selain itu bertujuan untuk memperkuat pemerintah kolonial dan adanya kepentingan pemerintah kolonial dalam penyebaran agama kristen di wilayah Hindia Belanda.

Dengan ini pemerintah Belanda melegislasi Peradilan Agama, namun dengan terselubung bermaksud mematikan Peradilan Agama dengan cara sedikit demi sedikit mengurangi kewenangan serta membiarkan tanpa pembinaan.

## B. Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Pendudukan Jepang

Tahun 1942 adalah tahun Indonesia diduduki oleh Jepang. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan dan pengadilan ialah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan, *Sooryoo*

---

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, 120.

*hoon* untuk Radd Agama dan *Kaikiooo Kottoo Hooiin* untuk Mahkamah Islam Tertinggi, berdasarkan aturan peralihan pasal 3 bala Jepang (*Osanu Seizu*) tanggal 07 Maret 1942 No.1.

Pada zaman Jepang, posisi pengadilan agama tetap tidak akan berubah kecuali terdapat perubahan nama menjadi *Sooryo Hooiin*. Pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 *Osanu Seizu* tanggal 7 Maret 1942 No. 1. Pada tanggal 29 April 1942, pemerintah balatentara Dai Nippon mengeluarkan UU No. 14 tahun 1942 yang berisi pembentukan *Gunsei Hoiin* (pengadilan pemerintah balatentara). Dalam pasal 3 UU ini disebutkan bahwa *Gunsei Hooiin* terdiri dari :

- a. *Tiho hooiin* (pengadilan negeri)
- b. *Keizai hooiin* (hakim poloso)
- c. *Ken hooiin* (pengadilan kabupaten)
- d. *Kaikioo kottoo hoin* (mahkamah Islam tinggi)
- e. *Sooryoo hoon* (raad agama)

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pengadilan agama pernah terancam yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintah bala tentara Jepang (*guiseikanbu*) mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung (*Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu*) dalam rangka Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka kelak.

Akan tetapi dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan opada tanggal 17 agustus 1945, maka pertimbangan dewan pertimbangan agung bikinan Jepang itu mati sebelum lahir dan peradilan agama tetap eksis disamping peradilan-peradilan yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama pada masa pendudukan Jepang ini baik posisi maupun wewenanganya tidak mengalami perubahan yang berarti, justru Jepang lebih bersikap terbuka terhadap Islam dengan pengakuan dan pengukuhan adanya Peradilan Agama, hanya istilah penyebutannya saja yang berbeda, ini

tentunya tidak terlepas dari kepentingan Jepang saat itu yang posisinya sedang kritis dan terjepit sebagai dampak dari perang dengan tentara sekutu, jadi saat mereka dalam keadaan lemah seperti ini tidak mungkin mereka merusak hubungan dengan kaum muslim di Indonesia, langkah yang diambil adalah sikap lentur terhadap Islam termasuk lembaga Peradilan Agama.

## REFERENSI :

- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Basiq Djalil, SH. MA. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Cik Hasan Bisri, MS. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsepKunci*, Jakarta : Paramadina, 1996.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Nasional di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mushofa, Sy. SH. MH. *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

## **SUSUNAN DAN KEKUASAAN PA MASA PENJAJAHAN A.**

### **A. Masa Kolonial Hindia Belanda**

Berbicara mengenai kondisi lembaga pengadilan pada zaman kolonial Hindia Belanda, tentu kita tidak bisa melepaskan dari kondisi hukum dan sosial yang terjadi pada masa itu. Yang paling mencolok adalah politik diskriminasi yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang melakukan pengklasifikasian masyarakat yang ada di Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu golongan eropa, timur asing, dan bumiputera (pribumi). Hal ini berakibat pada perbedaan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya lembaga-lembaga pengadilan yang berbeda yang berwenang mengadili masing-masing golongan tersebut. Secara umum dan ringkas, lembaga-lembaga pengadilan yang dimaksud adalah :

#### **1. Pribumi Indonesia**

##### ***Districtgerecht***

*Districtgerecht* terletak di kecamatan dan dipimpin oleh Camat sebagai hakim. Perkara-perkara yang disidangkan di *districtgerecht* adalah:

- Perkara perdata dengan nilai objek kurang dari 20 (dua puluh) gulden;
- Perkara pidana yang diancam maksimal pidana denda 3 (tiga) gulden

Putusan perdata dari *districtgerecht* dapat dimintakan banding ke *regentschapperecht*, sedangkan putusan pidananya bersifat final dan langsung mengikat (tidak dapat dimintakan banding).

##### ***Regentschapperecht***

*Regentschapperecht* terletak di kabupaten dan dipimpin oleh Bupati atau deputinya sebagai hakim. Perkara-perkara yang disidangkan di *regentschapperecht* adalah:

- Perkara perdata dengan nilai objek 20-50 gulden;

- Perkara pidana yang diancam maksimal pidana penjara 6 hari atau denda 3-10 gulden

*Regentschapgerecht* adalah pengadilan tingkat banding atas putusan *districtgerecht*. Putusan *regentschapgerecht* sendiri dapat dimintakan banding ke *landraad*.

### ***Rechtspraak fer Politierol/Politierol***

*Politierol* terletak di Kabupaten dengan asisten gubernur sebagai hakim tunggal. Lembaga pengadilan ini hanya mengadili perkara pidana yang diancam pidana denda maksimal 25 gulden. Lembaga pengadilan ini dibubarkan pada tahun 1901 dan digantikan oleh *landgerecht* pada tahun 1914.

### ***Landraad***

*Landraad* adalah lembaga pengadilan yang memiliki yurisdiksi se-kabupaten dimana hakim yang bertugas di *landraad* adalah hakim-hakim profesional. Perkara-perkara yang disidangkan di *landraad* adalah:

- Perkara perdata dengan nilai objek lebih dari 50 gulden atau di bawah 50 gulden untuk golongan Eropa;
- Perkara pidana di luar kewenangan *districtgerecht*, *regentschapgerecht*, dan *politierol*, salah satunya adalah pidana yang diancam pidana denda maksimal lebih dari 25 gulden.

Putusan *landraad* dapat dimintakan banding ke *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtschof*. Untuk putusan perdata dengan nilai objek di atas 100 gulden dan putusan pidana berupa putusan bebas, dapat dimintakan banding ke *Raad van Justitie*, sedangkan untuk putusan perdata dengan nilai objek di atas 500 gulden dan putusan pidana dengan pemidanaan selain bebas, dapat dimintakan banding ke *Hooggerechtschof*.

## **2. Golongan Eropa**

### ***Residentiegerecht***

*Residentiegerecht* berada di semua kota yang memiliki *landraad* dan memiliki wilayah yurisdiksi hukum sama

dengan *landraad*. Persidangan di *residentiegerecht* dipimpin oleh hakim tunggal, yang adalah hakim dari *landraad*. Perkara-perkara yang dapat disidangkan di *residentiegerecht* adalah sebagai berikut:

- Klaim yang nilainya tidak melebihi 500 gulden pada kewajiban pribadi, pembayaran untuk hak guna usaha, memperoleh kepemilikan properti pribadi.
- Klaim pada kerusakan yang diakibatkan manusia atau perilaku hewan atas tanah, semak-semak, pohon atau taman buah atau umbi-umbian, perbaikan dan kerusakan untuk properti nyata disewa, yang berada di bawah penguasaan penyewa.
- Klaim atas tindakan sewenang-wenang terhadap perencanaan penggunaan tanah, pohon, pagar, sungai, bendungan, saluran air atau yang mengakibatkan kerusakan pada hal-hal tersebut, yang sah di bawah hukum adat indonesia.
- Klaim dalam penyewaan property, yaitu pengosongan properti karena berakhirnya jangka sewa, terlepas dari harga sewa, kecuali bahwa di persidangan, penyewa dengan bukti tertulis membuktikan bahwa jangka sewa telah diperbaharui dan harganya melebihi 600 gulden per tahun.
- Klaim atas pemutusan kontrak sewa dan pengosongan properti yang disewa, dalam kasus penyewa diabaikan untuk membayar dan kemudian menyewa kecuali tidak melebihi 600 gulden.
- Permohonan (putusan yang bersifat deklaratoir) mengenai penyitaan properti yang telah dilakukan adalah sah selama dilakukan atas dasar klaim di bawah yurisdiksi *residentiegerecht*.
- Permohonan (putusan yang bersifat deklaratoir) mengenai pengosongan atau pelegalan tawaran pembayaran atau pembayaran agar barang disimpan di pengadilan, jika harga barang yang ditawarkan atau jumlah uang yang disetorkan tidak melebihi 500 gulden.



- Perlawanan klaim atas suatu hal yang mana hal tersebut berada di bawah yurisdiksi *residentiegerecht*.
- Penyelesaian perselisihan eksekusi hukuman jika para pihak adalah orang pribumi Indonesia atau timur asing non-cina, asalkan para pihak secara sukarela menundukkan diri pada hukum Eropa.
- Sengketa ketenagakerjaan terlepas dari berapa nilai sengketa nya dan golongan yang menjadi para pihak Tidak semua putusan *residentiegerecht* dapat diajukan banding ke *Raad van Justitie*. Hanya putusan atas perkara no. 9 di atas yang dapat dimintakan banding ke *Raad van Justitie* sebagai pengadilan tinggi.

### ***Raad van Justitie***

*Raad van Justitie* (RvJ) terletak di 6 (enam) kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Medan, dan Makassar. Wilayah hukum RvJ Jakarta meliputi Jawa Barat, Lampung, Palembang, Jambi, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Wilayah hukum RvJ Surabaya meliputi Jawa Timur dan Madura, Bali, Lombok, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Wilayah hukum RvJ Semarang meliputi Jawa Tengah. Wilayah hukum RvJ Padang meliputi Sumatera Barat, Tapanuli, dan Bengkulu. Wilayah hukum RvJ Medan meliputi Sumatera Timur, Aceh, dan Riau. Dan wilayah hukum RvJ Makassar meliputi Sulawesi, Timor, dan Maluku.

RvJ adalah pengadilan untuk orang golongan eropa, baik untuk perkara pidana, maupun perkara perdata. Untuk golongan chinese, pengadilan ini adalah pengadilan untuk perkara perdata. Pengadilan ini juga berwenang mengadili perkara perdata yang diajukan oleh orang-orang di luar golongan eropa dan chinese, selama hal yang diperkarakan adalah masuk ke dalam hukum eropa dan para pihak tersebut menundukkan diri secara sukarela pada hukum eropa. Selanjutnya, terlepas dari golongan masyarakat, RvJ berwenang untuk mengadili kasus perdata atas barang yang ditemukan dari laut dan teluk.

Untuk perkara pidana, tanpa memperhatikan asal golongan masyarakat, RvJ berwenang mengadili perkara pidana mengenai perdagangan budak (*slave trade*), tindak pidana ekonomi, pembajakan, perampokan barang ketika transit di pantai, perampokan barang di sungai, dan tindak pidana lainnya. RvJ juga berwenang mengadili sengketa kewenangan mengadili dari pengadilan-pengadilan yang berada di bawah nya. Disamping itu, RvJ merupakan pengadilan tingkat banding atas putusan-putusan *landraad* dan *residentiegerecht*.

Sejak tanggal 1 Januari 1983, RvJ Jakarta, sebagai pengadilan tingkat banding, memiliki panel khusus untuk mengadili perkara banding atas putusan *landraad* se- Jawa dan Madura. RvJ Surabaya dan Semarang tidak dapat lagi menjadi pengadilan banding atas putusan-putusan *landraad* tersebut. Untuk putusan-putusan *landraad* di wilayah lainnya, apabila para pihak bersepakat, maka dapat langsung diajukan banding ke RvJ Jakarta, tanpa melalui RvJ yang seharusnya menjadi pengadilan banding atas perkara tersebut. Putusan banding RvJ Jakarta tidak dapat diajukan banding lagi.

Dalam perkara perdata, putusan RvJ sebagai pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding apabila nilai klaim/objek lebih dari 500 gulden. Sedangkan, dalam perkara pidana, putusan RvJ yang dapat dimintakan banding (sebagai pengadilan tingkat pertama) adalah seluruh putusan kecuali putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Pengadilan banding atas putusan RvJ adalah *Hooggerechtshof*.

### ***Hooggerechtshof***

*Hooggerechtshof*, atau Mahkamah Agung Kolonial, terletak di Jakarta dengan wilayah yurisdiksi seluruh Hindia Belanda. *Hooggerechtshof* dipimpin oleh "*chief justice*", atau yang sekarang disebut sebagai Ketua Mahkamah Agung. Selain sebagai pengadilan tingkat banding terakhir.

*Hooggerechtshof* adalah pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dimana tindak pidana dilakukan oleh pejabat tinggi lembaga yudisial dan administratif, seperti anggota *volksraad* (DPR

masa Hindia Belanda). Putusan *Hooggerechtshof* bersifat final dan mengikat.

*Hooggerechtshof* memiliki kekuasaan untuk *me-review* putusan-putusan pengadilan yang sudah dijatuhkan sebelumnya. Selain itu, fungsi utama *hooggerechtshof* adalah men-supremasi implementasi kekuasaan kehakiman oleh pengadilan di bawah nya. Selain lembaga-lembaga pengadilan di atas, ada beberapa lembaga peardilan yang memiliki keistimewaan, yang dibentuk pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu ***Landgerecht***. *Landgerecht* adalah lembaga pengadilan umum berdiri menggantikan *Politierol* sejak tahun 1914. Keistimewaan dari *Landgerecht* adalah lembaga pengadilan ini dapat mengadili perkara untuk semua golongan. *Landgerecht* dijalankan oleh hakim professional.

Pemeriksaan di *landgerecht* dilakukan dengan hakim tunggal. Jenis perkara yang dapat disidangkan di *landgerecht* adalah perkara pidana yang diancam maksimal dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara atau denda 500 gulden. Putusan *landgerecht* tidak dapat diajukan banding.

Walaupun mengadili dari semua golongan masyarakat (eropa, timur asing, dan pribumi), namun hukum acara yang dipakai untuk masing-masing golongan masyarakat adalah berbeda. Kalau tindak pidana tersebut dilakukan oleh golongan pribumi dan eropa, maka hukum acara yang digunakan adalah hukum acara untuk golongan eropa.

Hal yang menarik dari sistem pengadilan pada masa kolonial Hindia Belanda ini adalah apabila suatu perkara melibatkan 2 atau lebih orang dari golongan yang berbeda, maka apabila perkara tersebut adalah perkara pidana, akan diadili di *Raad van Justitie*, sedangkan apabila perkara tersebut adalah perkara perdata, akan diadili di *residentiegerecht*.

Selain lembaga-lembaga pengadilan yang tersebut di atas, yang lazim disebut "lembaga peradlan umum", pada masa kolonial Hindia Belanda juga dibentuk beberapa lembaga pengadilan lain, yaitu:

## ***Inheemsche Rechtspraak***

*Inheemsche Rechtspraak* adalah lembaga pengadilan yang dibentuk untuk golongan bumiputera/pribumi Indonesia yang tidak dilaksanakan berdasarkan "*In Naam des Konings*" (Atas Nama Raja/Ratu). Pengadilan ini dilaksanakan oleh seorang hakim yang bukan hakim pemerintah Belanda, melainkan diserahkan kepada penguasa adat setempat. Ada 3 bentuk *Inheemsche Rechtspraak* ini, yaitu:

1. *Inheemsche Rechtspraak* di daerah swapraja, yaitu daerah yang tidak langsung berada di bawah Pemerintah Hindia Belanda (*Indirect Gebeid*), yang dikenal dengan istilah "Pengadilan Swapraja";
2. *Inheemsche Rechtspraak* di daerah yang langsung di bawah Pemerintah Hindia Belanda (*Direct Gebeid*), yang dikenal dengan istilah "Pengadilan Adat". Pada tahun 1935, untuk daerah ini, dibentuk suatu pengadilan bumiputera yang disebut "Pengadilan Desa" (*Dorpsrechtspraak*), yang memutus perkara dengan hukum adat, tidak boleh menjatuhkan pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengadilan ini tidak dikenal di Batavia (Jakarta), dan hanya terdapat di Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Irian Jaya (Papua).
3. *Godsdienstige Rechtspraak* (Pengadilan Agama) yang menurut hukum yang hiduo dalam masyarakat merupakan bagian tersendiri dari Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 bentuk Pengadilan Agama, yaitu:
  - Pengadilan Agama yang dihubungkan dengan *Gouvernement Rechtspraak* (Pengadilan Pemerintah), yang diatur secara resmi dengan *Staatsblad* Hindia Belanda 1929 Nomor 221 Nomor 487. Pengadilan Agama untuk Pulau Jawa dan Madura diatur dalam *Staatsblad* Hindia Belanda 1937 Nomor 119, yang dimasukkan menjadi Pasal 2a *Koninklijk Besluit Staatsblad* Hindia Belanda 1882

Nomor 152 *jo.* 152, yang kemudian disebut sebagai "*Raad Agama*". Sebagai pengadilan banding atas putusan *Raad Agama*, dibentuklah Mahkamah Islam Tinggi (*Hof voor Islamietische Zaken*) di Batavia (Jakarta). Untuk Pengadilan Agama di Kalimantan diatur berdasarkan *staatsblad* Hindia Belanda 1937 Nomor 638.

- Pengadilan Agama yang tidak diatur dengan undang-undang (*staatsblad*) pengaturannya diserahkan kepada tata pemerintahan adat setempat

### ***Krygsraad***

*Krygsraad* adalah Pengadilan Militer. Pengadilan Militer pada masa kolonial Hindia Belanda terdiri dari *Krygsraad* sebagai Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan *Hoogmilitair Gerechtshof* sebagai Pengadilan Militer Tingkat Banding.

## **B. Masa Penjajahan Jepang**

Pada masa penjajahan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi dengan lembaga pengadilan dan pada dasarnya lembaga-lembaga pengadilan yang ada adalah lanjutan lembaga-lembaga pengadilan yang sudah ada pada masa kolonial Hindia Belanda. Kekuasaan Jepang yang hanya berlangsung selama 3,5 tahun mengakibatkan tidak banyak pengaruh yang terjadi dari sistem hukum dan peradilan Jepang ke sistem hukum dan peradilan Indonesia. Ada 2 hal paling terlihat mengenai perubahan lembaga pengadilan umum pada masa ini, yaitu:

1. Pemerintahan Jepang menghapuskan dualisme peradilan sesuai asas peradilan Jepang bahwa hanya ada satu macam peradilan untuk semua golongan penduduk, walaupun dengan beberapa pengecualian bagi orang-orang Jepang di Indonesia. Misalnya, untuk *Tiho Hoin* (sebelumnya *landraad*), yang merupakan pengadilan sehari-hari bagi semua golongan penduduk, kecuali orang Jepang yang ada di Hindia Belanda/Indonesia tetap berlaku hukum dan peraturan

perundang-undangnya sendiri. Penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh opsir-opsir Jepang pada *Gunsei Hoin*;

2. Nama-nama lembaga pengadilan diubah. Perubahan yang dimaksud adalah:

- *Districtgerecht* menjadi *Gun Hoin*
- *Regentschapperecht* menjadi *Ken Hoin*
- *Landgerecht* menjadi *Keizai Hoin*
- *Landraad* menjadi *Tiho Hoin*
- *Raad Agama* menjadi *Sooryoo Hoin*
- *Hof voor Islamietische Zaken* menjadi *Kaikyo Kootoo Hoin*
- *Raad van Justitie* menjadi *Koto Hoin*
- *Hooggerechtshof* menjadi *Saiko Hoin*

Pada awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mempertahankan susunan pengadilan umum yang ada, namun dengan perubahan penyebutan, yaitu:

1. *Districtgerecht/Gun Hoin* menjadi Pengadilan Distrik
2. *Regentschapperecht/Ken Hoin* menjadi Pengadilan Kabupaten
3. *Landgerecht/Keizai Hoin* menjadi Pengadilan Kepolisian
4. *Landraad/Tiho Hoin* menjadi Pengadilan Negeri
5. *Raad van Justitie/Koto Hoin* menjadi Pengadilan Tinggi
6. *Hooggerechtshof/Saiko Hoin* menjadi Mahkamah Agung

Baru kemudian, seiring berjalannya waktu, Pengadilan Distrik, Pengadilan Kabupaten, dan Pengadilan Kepolisian, berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, secara tersirat, dilebur kekuasaannya ke Pengadilan Negeri.

Sehingga, seperti yang diatur dengan jelas pula dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948, susunan lembaga pengadilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang adalah susunan lembaga pengadilan umum yang sampai saat ini kita kenal.

Sejarah memang selalu menarik dipelajari, setidaknya menurut penulis. Dengan sejarah, kita bisa mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana proses terciptanya/terjadinya sesuatu dan mendapatkan gambaran pada saat proses tersebut terjadi. Itulah yang penulis coba berikan dalam tulisan ini. Semoga tulisan ini bisa memberikan pengetahuan baru dan gambaran yang mudah dipahami buat penulis mengenai sejarah struktur lembaga pengadilan, khususnya pada masa kolonial Hindia Belanda dan penjajahan Jepang. Dan besar harapan penulis agar kita semua tidak melupakan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia dan bisa saling menyampaikan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia agar pengetahuan yang kita miliki tentang sejarah Indonesia semakin bertambah.

## **REFERENSI :**

Ansyahrul, *Sejarah Peradilan Umum di Jakarta*, Jakarta : Pengadilan Tinggi Jakarta, 2013.

Sebastiaan Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.



## **PERADILAN AGAMA DALAM TATA PERADILAN DI INDONESIA SEJAK MASA KEMERDEKAAN**

Sebelum Islam datang ke Indonesia telah ada dua macam peradilan, yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Materi hukum Peradilan Pradata bersumber dari ajaran Hindhu dan ditulis dalam Papakem. Sedangkan Peradilan Padu menggunakan hukum materiil tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan – kebiasaan masyarakat. Dalam prakteknya, Peradilan Pradata menangani persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wewenang raja, sedangkan Peradilan Padu menangani persoalan-persoalan yang tidak berhubungan dengan wewenang raja. Keberadaan dua sistem peradilan ini berakhir setelah raja Mataram menggantikan dengan sistem Peradilan Serambi yang berasaskan Islam. Penggantian ini bertujuan untuk menjaga integrasi wilayah kerajaan Mataram.

Peradilan Agama sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan kenegaraan pernah mengalami pasang surut ketika Sultan Agung meninggal dan digantikan oleh Amangkurat I. Amangkurat I pernah menutup Peradilan Agama dan menghidupkan kembali Peradilan Pradata. Setelah masa ini Peradilan Agama eksis kembali. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya sebuah kitab hukum Islam "*Shirath al – Mustaqin*" yang ditulis Nurudin Ar – Raniri. Kitab ini menjadi rujukan para hakim di Indonesia.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Peradilan Agama mendapat pengakuan secara resmi. Pada tahun 1882 pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblad No.152 yang merupakan pengakuan resmi terhadap eksistensi Peradilan Agama dan hukum Islam di Indonesia.

Karena Staatsblad ini tidak berjalan efektif dan karena pengaruh teori *reseptie*, maka pada tahun 1937 keluarlah staatsblad 1937 No. 116. Staatsblad ini mencabut wewenang yang dipunyai oleh Peradilan Agama dalam persoalan waris dan masalah – masalah lain yang berhubungan dengan harta benda, terutama tanah. Sejak itulah

kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan dan perceraian. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa Peradilan Agama pada masa ini tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri, melainkan harus dimintakan pegukuhan dari Peradilan Negeri.

Pengurangan terhadap kompetensi Peradilan Agama tersebut tentunya sangat mengecewakan masyarakat muslim Indonesia karena Peradilan Agama pada waktu itu betul – betul mereka anggap sebagai lembaga peradilan layaknya lembaga peradilan, bukan sebagai lembaga agama semata. Belum lagi pada masa ini Peradilan Agama hanya dapat menghidupi dirinya sendiri melalui ongkos perkara yang diterimanya. Hal ini dilakukan karena pemerintah kolonial tidak pernah mensubsidi Peradilan Agama untuk pengelolah administrasinya, termasuk tidak menggaji hakim dan pegawainya. Kenyataan bahwa hakim dan pegawai Peradilan Agama menerima uang dari mereka yang menggunakan jasa peradilan inilah yang belakangan dipakai sebagai alat oleh Belanda untuk mengatakan bahwa Peradilan Agama adalah sarang korupsi.

Demikian liku – liku eksistensi Peradilan Agama pada masa kerajaan serta penjajahan Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang tidak ada perubahan signifikan tentang eksistensi Peradilan Agama sampai memasuki kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Periode 1945 – 1957**

Pada awal tahun 1946, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, dibentuklah Kementrian Agama. Departemen Agama dimungkinkan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga – lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Berlakunya UU No. 22 tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud – maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama sendiri.

Pada masa ini, Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi yang telah ada tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan. Selang tiga bulan berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui Keputusan Pemerintah Nomor 1/ SD, Pemerintah mengeluarkan penetapan No. 5/ SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Sejak saat itulah peradilan agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama.

Setelah Pengadilan Agama diserahkan pada Departemen Agama, masih ada sementara pihak tertentu yang berusaha menghapuskan keberadaan Peradilan Agama. Usaha pertama dilakukan melalui Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1948. Usaha kedua melalui Undang – Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Susunan Kekuasaan Peradilan Sipil. Usaha – usaha yang mengarah pada penghapusan Peradilan Agama ini menggugah minat untuk lebih memperhatikan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama selanjutnya ditempatkan dibawah tanggung jawab Jawatan Urusan Agama. Penetapan Pengadilan Agama di bawah Departemen Agama merupakan langkah yang menguntungkan sekaligus sebagai langkah pengamanan, karena meskipun Indonesia merdeka, namun pengaruh teori *receptie* yang berupaya untuk mengeliminir Peradilan Agama masih tetap hidup. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama akan dimasukkan secara istimewa dalam susunan Peradilan Umum, yaitu bahwa perkara – perkara antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup (*living law*) harus dipatuhi menurut hukum Islam, harus diperiksa oleh badan Peradilan Umum dalam semua tingkatan Peradilan, terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan dua hakim ahli agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Dalam rentang waktu 12 tahun sejak proklamasi kemerdekaan RI (1945 – 1957) ada tujuh hal yang dapat di ungkapkan yang terkait langsung dengan peradilan agama di Indonesia:

1. Berkaitan dengan penyerahan kementrian agama melalui penetapan pemerintah No.5-SD tanggal 25 Maret 1946;
2. Lahirnya Undang-Undang Nomo5 22 Tahun 1946;
3. Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948;
4. Masa Kemerdekaan RIS tanggal 27 Desember 1950;
5. Lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951;
6. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

### **Periode 1957 – 1974**

Peradilan Agama dalam rentang waktu lebih kurang 17 tahun, yakni tahun 1957 – 1974 ada 4 hal yang perlu kita ketahui dengan kelahiran PP dan UU yakni PP No.29/1957 PP No.45/1957, UU No.19/1970 dan penambahan kantor dan cabang kantor peradilan agama.<sup>31</sup>

Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1964 disah UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut undang – undang ini, Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai fungsi pengayoman yang dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun tidak lama kemudian, undang – undang ini diganti dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok – Pokok Kehakiman karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan. Dalam Undang – Undang baru ini ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Ditegaskan demikian karena sejak tahun 1945 – 1966 keempat lingkungan peradilan diatas bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan disana sini masih mendapatkan intervensi dari kekuasaan lain.

Undang – undang No. 14 tahun 1970 merupakan undang – undang organik, sehingga perlu adanya undang – undang lain sebagai

---

<sup>31</sup> Djalil Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, 73.

peraturan pelaksanaannya, yaitu undang – undang yang berkait dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk juga Peradilan Agama.

### **Periode 1974 – 1989**

Dalam masa kurang lebih 15 tahun yakni menjelang disahkannya UU No.1/1974 tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya UU No.7/1989 tentang peradilan agama. Ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan peradilan agama di Indonesia:<sup>32</sup>

1. Tentang proses lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pelaksanannya PP No.9 Tahun 1974;
2. Tentang lahirnya PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sekarang telah diperbaharui UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Terlepas dari itu semua, harus diakui bahwa UU No. 1 tahun 1974 ini sangat berarti dalam perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, karena selain menyelamatkan keberadaan Peradilan Agama sendiri, sejak disahkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaanya, maka terbit pulalah ketentuan Hukum Acara di Peradilan Agama, biarpun baru sebagian kecil saja. Ketentuan Hukum Acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum Acara yang dimaksud diletakkan Bab IV yang terdiri dari 37 pasal.

Terlepas dari gencarnya pro dan kontra perihal pengesahan UU No.7 tahun 1989 diatas, bahkan tak kurang dari empat ratus artikel tentang tanggapan pro dan kontra tersebut dimuat di media massa, namun akhirnya pada tanggal 27 Desember 1989 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh DPR yang kemudian yang diikuti dengan dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 1991

---

<sup>32</sup> Djalil Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, 73.

tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan disahkan UU tersebut bukan saja menyejajarkan kedudukan Pengadilan Agama dengan lembaga peradilan – peradilan lain, melainkan juga mengembangkan kompetensi Pengadilan Agama yang dulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial. Pasal 49 UU itu menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang:

- b) Perkawinan
- c) Kewarisan, Wasiat dan Hibah
- d) Wakaf dan Shodaqoh

Dalam Pasal 49 ayat 3 dinyatakan bahwa:

Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa – siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian- bagian ahli waris dan melaksanakan pembagian pada harta peninggalan tersebut.

Dalam ayat 3 diatas terlihat bahwa Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan keputusannya sendiri, tidak perlu meminta *executoir verklaring* lagi dari Pengadilan Umum.

Secara politis, pengakuan Pengadilan Agama oleh negara juga merupakan lompatan seratus tahun sejak pertama kali peradilan ini diakui oleh pemerintah pada tahun 1882. Pengadilan Agama adalah simbol kekuatan dan politik Islam.

**REFERENSI :**

Djalil Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

## **SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI (SO) PERADILAN AGAMA DI INDONESIA**

### **A. Susunan Hierarki Peradilan Agama**

Struktur organisasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam UU No.7 Tahun 1989. Menurut ketentuan pasal 9 UU No.7 Tahun 1989 tersebut adalah :<sup>33</sup>

1. Struktur Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, sekretaris, dan juru Sita.
2. Struktur Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, sekretaris.

### **Struktur Pengadilan Agama**

Struktur organisasi Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, sekretaris, dan juru Sita.<sup>34</sup>

#### **a. Pimpinan Pengadilan**

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan Mahkamah Agung.

#### **b. Hakim**

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

#### **c. Panitera**

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya. Panitera dibantu oleh seorang wakil panitera. Beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan juru sita. Panitera,

---

<sup>33</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2003, 190.

<sup>34</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media, 2005, 121.



wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

d. Sekretaris

Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin secretariat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan. Wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

e. Juru Sita

Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Juru sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.<sup>35</sup>

### **Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama**

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama hampir sama dengan susunan organisasi Pengadilan Agama. Perbedaannya pada juru sita dalam kelompok fungsional dan panitera muda. Juru sita tidak terdapat dalam struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama karena Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi. Sedangkan jumlah panitera

---

22. <sup>35</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media, 2005,

muda pada Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum.<sup>36</sup>

Makna Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari yang menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara lebih dulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam pasal 56 yang berbunyi: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya."<sup>37</sup>

Dari pengertian Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan terbawah yang bertindak sebagai pintu gerbang penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan setiap perkara. Perkara yang tidak lebih dulu diajukan ke Pengadilan Agama, tidak akan pernah mendapat penyelesaian. Tidak boleh langsung diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi yakni Pengadilan Tinggi. Karena fungsi peradilan yang diberikan Undang-undang kepada Pengadilan Tinggi bukan sebagai Pengadilan tingkat pertama, tapi pengadilan tingkat banding.

Memang menurut pasal 6, di atas Pengadilan agama secara Hierarkis dan instansional ditempatkan Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan sebagai pengadilan "tingkat banding". Pengadilan Tinggi agama bertindak dan berwenang "memeriksa ulang" suatu

---

<sup>36</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media, 2005, 24.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, 112.

perkara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama, apabila pihak yang berperkara mengajukan permintaan banding. Dengan kata lain, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama, dapat mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi mengoreksi putusan Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding dapat menguatkan (membenarkan) putusan Pengadilan Agama, jika putusannya itu dianggap sudah tepat. Bisa juga menguatkan tapi sekaligus memperbaiki amar atau pertimbangan yang kurang jelas. Atau hanya sekadar menambah pertimbangan yang kurang lengkap. Sebaliknya berwenang untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama. Berbarengan dengan pembatalan itu Pengadilan Tinggi “mengadili sendiri” dengan amar putusan yang berlainan sama sekali dengan amar putusan Pengadilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama dikaitkan dengan hierarki instansional, disebut putusan Pengadilan “tingkat pertama”. Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam tingkat banding disebut putusan “tingkat terakhir”. Hal ini sesuai dengan penegasan pasal 10 ayat (3) UU No.14 Tahun 1970 dan pasal 29 UU NO.14 Tahun 1985 yang berbunyi: *“Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.”*

Makna putusan Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan tingkat terakhir ialah pemeriksaan mengenai keadaan, fakta, pembuktian pokok perkara sudah selesai dan berakhir. Itu sebabnya pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding disebut peradilan *judex facti*. Tidak ada lagi instansi peradilan yang dapat menilai dan mengutak-utik hal-hal yang berkenaan dengan fakta dan pembuktian yang telah dinilai Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi, karena penilaian dan putusan tentang itu sudah berakhir dan final. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai peradilan “kasasi” yang kewenangannya terbatas dalam memeriksa dan memutus dalam hal-hal tertentu dan terbatas sesuai apa yang diatur dalam pasal 30 UU No. 14 Tahun 1989.

Mengenai susunan Peradilan Agama secara “horizontal” berkedudukan pada setiap kotamadya atau ibukota kabupaten. Susunan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan pada setiap ibukota provinsi.<sup>38</sup>

### **B. Susunan Organisasi Peradilan Pengadilan Tinggi Agama**

Mengenai susunan organisasi pengadilan tinggi Agama sama dengan susunan organisasi Pengadilan Agama. Perbedaanya hanya terletak pada bidang juru sita. Jika pada susunan organisasi Pengadilan Agama terdapat sub bagian juru sita yang ditetapkan pada bagian struktur fungsional kepaniteraan Pengadilan Tinggi. Hal ini memang logis. Di tinjau dari segi kedudukan hierarki pengadilan Tinggi secara instansional adalah peradilan tingkat banding, tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan pemanggilan, pemberitahuan penyitaan, dan eksekusi. Sedang fungsi juru sita adalah tugas-tugas pelayanan mengambil, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi.

Yang bertindak sebagai pimpinan pada Pengadilan tinggi Agama sama dengan pimpinan pada pengadilan agama. Dimana pimpinan dilakukan oleh ketua dan Wakil ketua.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, ketua dan wakil ketua di bantu oleh jajaran pejabat fungsional yang terdiri dari para hakim tinggi, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Sedang untuk mendukung kelancaran organisasi pengadilan Tinggi secara umum, ketua dan wakil ketua dibantu oleh pejabat struktural yang dipimpin oleh seorang Wakil sekretaris. Di bawah ini akan di sampaikan berturut-turut syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, dan penyempahan ketua, wakil ketua, Hakim tinggi, panitera, sekretara muda, panitera pengganti, dan wakil sekretaris Pengadilan Tinggi Agama.

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, 112.

## REFERENSI :

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2003, 190.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media, 2005.

## **KEKUASAAN PA PADA MASA KEMERDEKAAN (DARI TAHUN 1957 – TAHUN 1998)**

### **A. Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia Pada Masa Kemerdekaan**

Dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan keberlakuan UUD 1945 pada tanggal 17 dan 18 August 1945, kedudukan hukum Islam secara umum tidak diubah dan masih berfungsi sebagai sistem hukum khusus orang Islam di bidang tertentu. Kedudukan tersebut diwujudkan ketentuan bahwa Republik Indonesia adalah negara berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut dinyatakan dengan Pembukaan dan Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 secara sesuai dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 diikuti dengan Ayat (2) yang berbunyi, 'Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu'.

Dalam rangka ketentuan UUD 1945 tersebut, Indonesia tidak menjadi negara sekular seperti Negara Barat dan Negara Komunisme. Indonesia pula tidak menjadi negara agama tertentu atau negara Islam seperti Negara Timur Tengah. Melainkan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menimbulkan negara agama terbuka atau negara dengan kebebasan beragama. Dalam negara itu, hukum Islam tidak boleh menjadi sistem hukum untuk segala lembaga pemerintahan atau seluruh Indonesia. Melainkan, hukum Islam hanya mempunyai kedudukan sebagaimana ditetapkan pada masa Belanda.

Kedudukan hukum Islam tersebut dikukuhkan melalui keberlakuan peraturan perundangan Belanda. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan 'Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini'. Dengan ketentuan tersebut, Staatsblad 1882/No.152 yo. Staatsblad 1937/No.116, 610, 638 dan 639 diterapkan. Namun demikian, ada orang yang

berpendapat UUD 1945 mengandung ketentuan baru yang mencabut teori *receptio in complex* sampai Pasal 134 Ayat (2) *Indische Staatsregeling* 1929 tidak berlaku melalui Aturan Peralihan UUD 1945 ini.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1945 dimaksud mencapai kepastian hukum Islam. Namun demikian, Pemerintah Republik Indonesia tidak memberikan wewenang yang luas kepada Pengadilan Agama. Melainkan, Pemerintah Republik Indonesia ingin mencabut dan membatasi wewenangnya.

Usaha mencapai kepastian hukum Islam mulai dengan UU No.22/1946. UU tersebut mengatur pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk orang Islam dan mencabut peraturan perundangan Belanda yang tidak jelas. Selain itu, UU No.22/1946 mengandung jadwal penyusunan kompilasi hukum Islam.

## **B. Peradilan Agama Pasca Awal Kemerdekaan**

Di jaman revolusi fisik sekitar tahun 1945-1950 peradilan agama masih berdasarakan kepada peraturan perundangan pemerintah colonial seperti tersebut di atas. Namun demikian di beberapa daerah terdapat usaha usaha untuk membentuk pengadilan-pengadilan agama sendiri seperti di daerah aceh telah di bentuk mahkamah mahkamah syari'ah negeri untuk tingkat kecamatan, tingkat kewedaan, tingkat kabupaten dan tingkat propinsi dengan kekuasaan mengadili yang lebih luas. Tahun 1948 dengan undang-undang No. 1948 peradilan agama di jadikan bagian di peradilan umum akan tetapi undang undang ini tidak sempat berlaku.

Undang-undang darurat No. 1 tahun 1951 pasal 1 ayat (2) menghapuskan semua peradilan adat dan swapraja klecuali peradilan agama juika merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja. Atas dasar pasal 1 ayat (2) tersebut peradilan agama terus berjalan walaupun dengan bermacam-macam nama kekuasaan yang berbeda-beda.

Pada tanggal 2 agustus 1957 pemerintah RI mengundang tentang peraturan pemerintah No. 29 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/ mahkamah syari'ah untuk daerah istimewa aceh akan tetapi PP ini tidak sempat berlaku karena mendapat tanggapan tanggapan dari daerah-daerah lainnya sehingga pada tanggal 5 Oktober 1957/L.N.No.99 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah syari'ah di luar jawa dan Madura, dengan bunyi pasal-pasal nya sama dengan PP No. 29 tahun 1957 tentang pengadilan agama/ mahkamah syari;ah untuk daerah istimewa aceh.

Kekuasaan peradilan di luar jawa, Madura dan Kalimantan selatan ini di sebutkan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 45 tahun 1957 yaitu sebagai berikut : “ pengadilan agama/mahkamah syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama islam. Dan segala perkara yang menurut hokum yang hidup di putus menurut agama islam yang berkenaan nikah, thlaq, rujuk, fasakh, nafakah, maskawin(mahar)., tempat kediaman (maskan) mut'ah dan sebagainya, hadlanah, perkara waris,, wakaf, hibah, sadakoh, baitulmaal dan lain lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara penceraian, dan pengesahan bahwa syarat taqlik sudah berlalu.

Kekuasaan pengadilan agama ini lebih luas derngan kekuasaan pengadilan agama di jawa, Madura, Kalimantan selatan , berdasarkan stb. 1937 No.116 dan Stb.1937 No. 638, akanm tetapi msih di cantumkannya kata-kata, “ menurut hokum yang hidup” (istilah yang di ciptakan belanda dalam Stb. 1937 NO. 116), maka sering terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan putusan dalam perkara yang sama antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan : “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. dalam hal ini termasuk bidang Peradilan Agama.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, atas usul Menteri Agama yang disetujui Menteri



Kehakiman, pemerintah menetapkan bahwa pengadilan Agama diserahkan dari kekuasaan Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan ketetapan pemerintah Nomor 5 tanggal 25 Maret 1946. Pada masa awal kemerdekaan, terjadi perubahan dalam pemerintahan, tetapi tidak tampak perubahan yang sangat menonjol dalam tata peradilan, khususnya peradilan Agama di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena bangsa Indonesia dihadapkan kepada revolusi fisik dalam menghadapi Belanda yang kembali akan menjajah. Namun pada aspek jasa terdapat sebuah perubahan, yaitu sebelum merdeka pegawai Pengadilan Agama dan hakim tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah, maka setelah merdeka anggaran belanja Pengadilan Agama disediakan pemerintah.

Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUD Sementara dan Pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Menurut ketentuan Pasal 1, "Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/mahkamah Syariah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri".

Dengan berlakunya PP. 45 Tahun 1957, maka di Indonesia ada tiga macam peraturan tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, yaitu

- a. Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl.1937 No.116 dan 610 untuk Jawa dan Madura.
- b. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk daerah Kalimantan Selatan.
- c. PP. No. 45 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Tahun 1957 No.99 untuk daerah-daerah selain Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan.

### **C. Masa Orde Baru**

Dalam kurun waktu sekitar 25 tahun sejak kemerdekaan terdapat keanekaragaman dasar penyelenggaraan, kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan PADI.

Selanjutnya, tahun 1970-an mengalami perubahan, terutama sejak diundangkan dan berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya. UU No.14/1970 mengundangkan : “susunan, Kekuasaan dan Acara dari Badan-badan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara” harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Dengan berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1970 memberi tempat kepada PADI sebagai salah satu peradilan dalam tata peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No.14/1974 Pasal 10 ayat (1) mengundangkan : “kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

- a. Tata Usaha Negara
- b. Peradilan Umum
- c. Peradilan Agama
- d. Peradilan Militer.

Peradilan Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi dasar Menteri Agama pada 1980 mengeluarkan keputusan untuk menyeragamakan nama-nama pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dengan sebutan “Pengadilan Agama”, sedangkan untuk pengadilan tingkat banding sebutan namanya menjadi “Paengadilan Tinggi Agama” di seluruh Indonesia.

#### **D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989**

Departemen Kehakiman dengan Koordinasi BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) menyediakan anggaran untuk RUU-PA. RUU-PA mengalami perjalanan cukup panjang dari tahun 1975-1988 sebelum diajukan ke DPR.

Pemerintah menyampaikan RUU tentang Peradilan Agama ke DPR dengan amanat (surat) Presiden No. R-06/RU/XII/1988 tanggal 13 Desember 1988 yang isinya agar RUU-PA dibahas dan disetujui oleh DPR. Untuk keperluan pembahasan itu presiden menunjuk

Menteri Agama sebagai wakil pemerintah. Pada 28 Januari 1989, DPR mengadakan sidang Paripurna Dewan dengan acara tunggal, mendengarkan keterangan pemerintah seputar RUU yang disampaikan Menteri Agama H. Munawir Syadzali.

Setelah dibahas secara mendalam, akhirnya pada tanggal 14 Desember 1989, RUU-PA disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Republik Indonesia tentang “Peradilan Agama”. 15 hari kemudian yaitu tanggal 29 Desember 1989, Undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disahkan dan diundangkan tanggal 29 Desember 1989, kemudian ditempatkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1989. UU tersebut merupakan salah satu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 1970. Secara umum isi UU tersebut memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan PADI, yaitu :

- a. Perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan PADI
- b. Perubahan tentang kedudukan PADI dalam tata peradilan nasional
- c. Perubahan tentang kedudukan hakim Peradilan Agama
- d. Perubahan tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan PADI
- e. Perubahan tentang hukum acara Peradilan Agama
- f. Perubahan tentang administrasi Peradilan Agama
- g. Perubahan tentang perlindungan terhadap wanita.

#### **E. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan kemajemukan hukum dalam system hukum nasional. KHI berhubungan dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang mengalami perubahan penting berkenaan dengan berlakunya

UU Nomor 7 Tahun 1989. Secara singkat, KHI dirumuskan dan disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam. Perumusan KHI didasarkan atas beberapa landasan :

Pertama, landasan historis yang terkait dengan pelestarian hukum Islam di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, KHI merupakan hukum yang hidup, melalui suatu proses perjalanan yang panjang. Kedua, landasan yuridis yang terkait dengan tuntunan normatif. Ketiga, landasan fungsional yang terkait dengan kebutuhan nyata didalam kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. KHI menurut para penyusunnya adalah fikih Indonesia.

Kehadiran UU tentang Peradilan Agama tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, peranan Hukum Islam menjadi kokoh. Walaupun kompilasi bukanlah UU, tetapi merupakan petunjuk terhadap UU yang dapat diterapkan oleh para hakim dalam yuridiksi Peradilan Agama dalam memecahkan perkara-perkara yang mereka hadapi.

**REFERENSI :**

Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Dadan Muttaqien, Sidiq dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1999.

## **KONDISI DAN KEKUASAAN PERADILAN AGAMA PADA MASA REFORMASI**

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke nusantara. Sejak agama Islam dianut oleh penduduk, hukum Islampun mulai diberlakukan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Perkembangan hukum Islam juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan kolonial Belanda, yang berusaha menghambat berlakunya hukum Islam dengan berbagai cara. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia mengalami pasang surut.

Hukum Islam bukan satu-satunya sistem hukum yang berlaku, tetapi terdapat sistem hukum lain, yaitu hukum adat dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini saling mempengaruhi dalam upaya pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, kedudukan hukum Islam mulai diperhitungkan dan diakui keberadaannya sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku. Pada masa berikutnya hukum Islam mulai mewarnai hukum nasional.

Perkembangan hukum Islam pada masa reformasi sampai sekarang ini mengalami kemajuan. Secara riil hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum privat atau perdata tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi daerah.

### **A. Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Satu Atap**

Pergeseran kekuasaan dari rezim orde baru ke pemerintahan orde reformasi, serta membawa berbagai perubahan dalam ranah sosial, politik, dan hukum. Perubahan mendasar pada bidang hukum yaitu dilakukannya amandemen atas UUD 1945. Salah satu pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Kemudian ketentuan konstitusi ditindaklanjuti dengan lahirnya UU no. 35 tahun 1999 tentang sistem peradilan satu atap, UU no. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah diamandemen atas UU no.14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan UU no. 48 Tahun 2009 telah diamandemen atas UU no. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>39</sup>

Sesuai dengan tuntutan reformasi dalam ranah hukum, sekaligus wujud nyata pengawalan terhadap perubahan mendasar dalam sistem peradilan yaitu dari sistem peradilan mendua menjadi peradilan satu atap. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU no. 48 Tahun 2009, maka kewenangan dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan agama berpindah dari lembaga eksekutif, yaitu direktorat pembina Peradilan Agama Departemen Agama kepada lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Adapun yang dimaksud dengan pemindahan kewenangan dalam bidang organisasi meliputi: kedudukan, tugas, fungsi kewenangan dan struktur organisasi.

Pembinaan peradilan dalam sistem satu atap oleh Mahkamah Agung itu merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (*impartial*). Dengan lahirnya perundang-undangan maka, terdapat berbagai akibat hukum yang bersinggung langsung dengan posisi Peradilan Agama. *Pertama*, secara organisatoris, administratif dan finansial, badan peradilan agama berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal' ini mengandung bahwa peradilan Agama sejak proklamasi kemerdekaan RI berada dibawah kekuasaan Departemen Agama, bergeser dan beralih ke dalam wilayah

---

<sup>39</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 151.

kekuasaan Mahkamah Agung. *Kedua*, sejak dikeluarkannya reformasi sistem hukum dan peradilan, termasuk yang bersinggungan dengan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan Peradilan Agama menjadi satu atap di bawah lingkungan Mahkamah Agung.<sup>40</sup>

Berkenaan dengan kebijakan sistem peradilan satu atap itu, maka dilakukan langkah adaptasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan badan peradilan agama. Maka dilakukannya amandemen sebanyak dua kali terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah meletakkan agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi, baik menyangkut teknis yudisial maupun nonyudisial. Yaitu urusan organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dimana perubahan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.<sup>41</sup>

Secara umum perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 152.

<sup>41</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 153.

<sup>42</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 154.



## **B. Peradilan Agama Sejak Amandemen**

### **1. Asas Peradilan Agama**

Dengan mencermati kandungan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No.7 tahun 1989 pasca amandemen, baik melalui UU No.3 Tahun 2006 maupun UU No. 50 Tahun 2009 (amandemen ke 2) dapat di temukan beberapa asas yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

#### **a. Personalitas keislaman**

Orang-orang yang bisa berperkara di lingkungan peradilan agama hanyalah orang-orang yang beragama Islam saja. Pernyataan tersebut dijelaskan dan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 50 Tahun 2009 (amandemen ke-2 atas UU No. 7 Tahun 1989) yang berbunyi: peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

#### **b. Pengadilan Tingkat Pertama dan Ke Dua**

Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan oleh pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No.3 Tahun 2006 yang berbunyi kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Ketentuan Pasal 3 itu dipertegas lagi dalam Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi pengadilan terdiri dari pengadilan agama, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama yang merupakan pengadilan tingkat banding.

#### **c. Wilayah Hukum Peradilan Agama**

Daerah hukum peradilan agama sebagai pengadilan yang bertugas menyelesaikan perkara tingkat pertama adalah daerah hukum ibu kota kabupaten atau pemerintah kota. Hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 UU No.3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah

kabupaten / kota. Sedangkan daerah hukum pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan yang bertugas menyelesaikan perkara banding adalah daerah hukum ibu kota provinsi dan daerah hukum yang meliputi wilayah provinsi. Hal ini secara jelas terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 UU No 3 Tahun 2006 *jo* UU No 50 Tahun 2009 yang berbunyi pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

d. Kewenangan Mengadili Perkara Tertentu

Kewenangan mengadili perkara dalam lingkungan peradilan agama terbatas pada perkara-perkara tertentu. Kewenangan mengadili perkara hanya bersifat khusus, yaitu meliputi hukum tertentu sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 itu merupakan perubahan di bidang yurisdiksi yang di berikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Pada awalnya kewenangan itu terbatas pada bidang domestik (ahwal syakhsiyah) kemudian bergeser ke ranah yang lebih luas, bidang domestik dan publik (muamalah), yakni di bidang zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Perubahan itu berkonsekuensi terhadap perluasan subjek hukum, tidak hanya orang tetapi juga mencakup badan hukum. Di samping itu, peradilan agama juga di identifikasi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 itu merupakan hasil perubahan dari “perkara perdata” sebagaimana di atur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Hal itu memberi peluang kepada pengadilan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana (jinayah).<sup>43</sup>

Rincian mengenai kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama itu adalah sebagai berikut:

❑ Bidang perkawinan

---

<sup>43</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 154-156.

Adapun yang dimaksud bidang perkawinan di sini adalah hal-hal yang di atur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syari'ah dalam kompilasi hukum Islam (KHI), antara lain:

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pecegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hasil seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang di tinggal kedua orang tuanya;
- s. Penentuan kewajiban ganti kerugian atasharta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

- u. Putusan tentang hal penolakan dan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

#### ❑ Bidang Waris

Dalam penjelasan atas pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan waris itu meliputi:

- a. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan
- e. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris

#### ❑ Bidang Wasiat

Dalam penjelasan atas pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang mana akan berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

#### ❑ Bidang Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum untuk dimiliki.

#### ❑ Badan Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk kesejahteraan umum menurut syari'at

#### ❑ Bidang Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

❑ Bidang Infaq

Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman mendermakan , memberikan rizki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.

❑ Bidang Ekonomi syari'ah

Bidang ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang mencakup :

- a. Bank syari'ah
- b. Asuransi syari'ah
- c. Reasuransi syari'ah
- d. Reksa dana syari'ah
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- f. Sekurasi syari'ah
- g. Pembiayaan syari'ah
- h. Pegadaian syari'ah
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- j. Bisnis syari'ah
- k. Lembaga keuangan mikro syari'ah

e. Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik

Kewenangan peradilan agama dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2006 *jo*, UU No. 50 Tahun 2009 dalam memeriksa perkara tersebut dirumuskan dalam pasal 50 terdapat kewenangan yang menuntut adanya penundaan pemeriksaan dan yang menuntut adanya pemeriksaan dan perkara atau lebih secara sekaligus

❑ Penundaan Memeriksa dan Mengadili

Secara eksplisit dirumuskan dalam pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 *jo*, UU No. 50 Tahun 2009, yang berbunyi dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 *jo*, UU No. 50 Tahun 2009, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

#### 2. Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik

Didalam pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 *jo*, UU No. 50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 *jo*, UU No. 50 Tahun 2009 perkara yang dimaksud meliputi : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infak, sodaqoh, dan ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan atas UU No. 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa ketentuan pasal 50 ayat (2) memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 *jo*, UU No. 50 Tahun 2009 apabila subjek sengketa itu terjadi diantara orang-orang yang beragama islam. Hal seperti ini menghindari adanya upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya.

#### f. Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak

Keharusan mengadili menurut hukum dan persamaan hak dirumuskan dalam pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *jo*, UU No. 3 Tahun 2006 *jo*, UU No. 50 Tahun 2009 dan pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. *Pertama*, rumusan mengadili menurut hukum sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal tersebut memberi pemahaman bahwa peradilan dalam melakukan pemeriksaan perkara harus berpedoman dan

berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku yaitu peraturan perundang – undangan yang sah dan dibuat oleh lembaga yang kompeten.

*Kedua*, rumusan mengadili “dengan tidak membedakan – bedakan orang “ mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengajukan perkara kepengadilan dalam lingkungan peradilan agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan.

g. **Aktif Memberi Bantuan**

Keharusan memberikan bantuan yang dilakukan oleh pengadilan dan perangkat terkait lainnya tertera dalam rumusan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 *jo*, pasal 5 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 yang berbunyi pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat.<sup>44</sup>

C. **Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Agung**

1. **Syarat – syarat menjadi seorang hakim**

Syarat - syarat menjadi seorang hakim pada pengadilan agama, diatur dalam pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 yaitu:

- Warga negara Indonesia
- Beragama islam
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Sarjana syari’ah, sarjana hukum islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam
- Lulus pendidikan Hakim
- Mampu secara rohani dan jasmani

---

<sup>44</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 156-160.

- Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- Berusia paling rendah 25 tahun tidak pernah dijatuhi pidana

## 2. Pengangkatan Hakim Agung

Terdapat perbedaan antara pengangkatan hakim agung sebelum reformasi dan setelah reformasi dengan amandemen UUD 1945. Pada masa orde lama proses pengangkatan Hakim Agung melibatkan ketiga lembaga tinggi negara yaitu eksekutif (presiden dan menteri kehakiman, yudikatif, (MA) dan legislatif (DPR). Aturan ini khusus ditetapkan bagi pemilihan hakim hanya melibatkan pihak yudikatif dan eksekutif. Dalam pasal 4-11 ayat 2 ditetapkan bahwa ketua, wakil, ketua dan hakim Mahkamah Agung dipilih oleh presiden atas anjuran DPR dari sekurang – kurangnya dua calon yang dipilih tiap-tiap pengangkatan.

### a. Pengangkatan Hakim Agung Pada Masa Orde lama

Pada masa orde lama pengangkatan hakim meski melibatkan lembaga lainnya seperti DPR namun keputusan akhir tetap ditangan eksekutif (presiden). Salah satu penyimpangan dan politisasi dalam pemilihan Hakim Agung sekaligus memperlihatkan bahwasannya eksekutif (presiden) saat itu adalah badan penentu akhir dengan diangkat dan ditetapkannya ketua Mahkamah Agung. Sebagai penasihat hukum dengan pangkat menteri berdasarkan per. Pers 4/1962 UU 30 masa orde lama secara birokrasi Mahkamah Agung telah kehilangan kebebasannya dan kemandiriannya sangat dimungkinkan pengaruh dari eksekutif.

### b. Pengangkatan Hakim Agung Pada Masa Orde Baru

Hakim pengadilan Agama selaku pejabat negara yang melaksanakan sebagian tugas – tugas kekuasaan kehakiman ditingkat pertama, diangkat oleh presiden atas usul ketua mahkamah Agung (Pasal 15 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009) dengan dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. (Pasal 3A ayat (1) UU.No 50 Tahun 2009) yang secara bersama sama dilakukan oleh mahkamah Agung. Pengangkatan hakim pada masa ini lebih



terlihat simpel. Pasal 15 ayat (1) UU no. 7 Tahun 1989 pengangkatan hakim harus dua kali tahapan, yaitu tahapan usulan dari Menteri Agama dan tahapan persetujuan oleh ketua mahkamah Agung. Proses pengangkatan hakim melalui sistem peradilan satu atap ini lebih efektif dan efisien serta akan relatif lebih cepat karena hanya kepada presiden oleh Ketua melalui satu tahapan usulan langsung dari segi kualitas juga akan lebih unggul, karena prosesnya lebih selektif dan transparan, dengan melibatkan dua lembaga tinggi negara yang kompeten.

Dalam menjalankan tugas dan pokoknya seorang hakim memiliki sesuatu hal yang dilarang oleh lembaga yaitu seorang hakim tidak boleh merangkap jabatan-jabatan penting yang dapat mengganggu konsentrasi sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) UU nomor 3 Tahun 2006. Ayat (1) berbunyi “kecuali ditentukan lain atau berdasarkan undang-undang hakim tidak boleh merangkap menjadi: pelaksanaan putusan pengadilan, wali, pengampu, pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, pengusaha, dll. Selanjutnya ayat (2) berbunyi “hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat”

Larangan hakim merangkap jabatannya hanya semata-mata untuk menjaga independensi dan menghindari kegamangan hakim dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, setiap kinerja dan aktivitas hakim dalam menyelesaikan perkara mendapat pengawasan yang ketat, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun eksternal oleh komisi yudisial berdasarkan kode etik dan perilaku seorang hakim (pasal 12 A ayat (2) UU no. 50).

Berkenaan dengan tugas pengawasan Komisi Yudisial sebagai mana terdapat pada pasal 12D ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 yang mana isinya “ menerima dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman hakim,

memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman hakim, dll.

### **3. Pemberhentian Hakim Pengadilan**

Terdapat 3 macam pemberhentian hakim :

#### **a. Pemberhentian Dengan Hormat**

Pasal 18 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, pemberhentian ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan dengan hormat dari jabatannya dikarenakan beberapa hal :

- Permintaan sendiri secara tertulis
- Sakit rohani atau jasmani secara terus menerus
- Telah berumur 65 tahun
- Merasa tidak cakap lagi dalam menjalankan tugasnya

#### **b. Pemberhentian dengan tidak hormat**

Pemberhentian dengan tidak hormat ini dikarenakan beberapa hal yang mana ketentuannya diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf a,b,c,d,e dan f UU No. 50 tahun 2009 yaitu:

- Dipidana penjara karena telah melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Melakukan perbuatan tercela
- Melalaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya secara berturut-turut selama 3 tahun
- Melanggar sumpah atau janji jabatan
- Melanggar larangan sebagaimana tertera dalam pasal 17
- Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim

Pemberhentian hakim pengadilan dengan hormat dari jabatannya sebagai mana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 dan pemberhentian hakim pengadilan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) UU No. 50

Tahun 2009. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam hal pemberhentian jabatan hakim tersebut.

*Pertama*, dengan pendekatan bahwa hakimbukan jabatan dalam eksekutif. Peraturan perundang undangan bidang kepegawain menyebutkan bahwa hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Dengan begitu seorang hakim yang diherhentikan dari jabatannya sebagai hakim tidak serta merta diberhentikan sebagai pegawai negeri. *Kedua*, dengan pendekatan status kepegawaian hakim dianggap melekat pada jabatannya sebagai hakim. Pendekatan ini didasarkan kepada sistem rekrutmen hakim yang salah satu persyaratannya menyatakan “ lulus pendidikan hakim”. Dlam pasal13 ayat (1) huruf f UU No. 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim adalah “lulus pendidikan hakim hal ini menunjukan kepastian hukum bahwa status kepegawaian hakim selaku pegawai negri “satu paket” dengan kata lain status kepegawaian hakim melekat dengan jabatannya, sehingga statusnya sebagai pegawai negeri dengan sebagai pejabat tidak dapat dipisahkan.

#### **4. Mediasi di Pengadilan Agama**

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga, guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi juga dapat di artikan sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan digunakan juga oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum islam. Mediasi sebenarnya merupakan istilah baru yang di dalam tradisi Islam disebut dengan *tahkim*. Tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti: menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003, 122.

Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi (tahkim) yang sekarang di praktikkan ter-integrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi ini memiliki suatu kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftarkan ke pengadilan (*connected to the court*). Landasan yuridisnya diawali pada Tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan (Perma) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dan (Perma) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>46</sup>

Di Indonesia, pranata sosial hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa orang-orang yang beragama Islam di luar pengadilan itu sudah dikenal sejak Islam berkembang (sekitar abad ke-13). Karena itu, sampai saat ini penyelesaian sengketa bagi komunitas Muslim dikenal melalui dua saluran, yakni: penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain melalui cara: negosiasi, mediasi, konsiliasi, persidangan mini, dan *ombudsman*.<sup>47</sup>

Di sini mediasi di posisikan sebagai salah satu upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator. Kehadiran mediasi dan bersinergi dengan pengadilan itu memiliki legitimasi yang sangat kuat, karena secara spesifik didukung oleh UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 50 Tahun 2009, dan UU No. 48 Tahun 2009. Meskipun penyelesaian melalui mediasi itu tidak akan menuntaskan seluruh persoalan yang dihadapi pengadilan, tetapi paling tidak diharapkan dapat mengurangi persoalan krusial yang terjadi selama ini.

---

<sup>46</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 233.

<sup>47</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 234.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya: perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan; mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan, sehingga penyelesaian perkara tidak berlarut-larut; meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara; memperlancar saluran keadilan pada masyarakat; memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak secara sukarela; lebih memungkinkan untuk terjadinya suatu kesepakatan, sehingga jalinan kekeluargaan di antara pihak-pihak dapat dipelihara; dan mengurangi terjadinya makelar kasus dalam pengadilan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 235.

**REFERENSI:**

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

## PIMPINAN DAN HAKIM PERADILAN AGAMA

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.<sup>49</sup> Ia menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (izhar al-hukum) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Dalam undang-undang disebutkan tugas pengadilan adalah : tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya hakim sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemamfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan-tahapan tersebut menjadikan hakim dituntut untuk jeli dan hati-hati untuk memberikan keputusan sekaligus menemukan hukumnya, karena pada dasarnya hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>49</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung : Rosda Karya, 1997, 104.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 Ayat (1), Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 56 ayat (1).

keyakinannya sesuai dengan doktrin *Curia Ius Novit*.<sup>51</sup> Karena dalam undang-undang dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diputus, dengan alasan bahwa hukum yang ada tidak ada atau kurang jelas.<sup>52</sup>

Sedangkan fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.<sup>53</sup> Artinya hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

Di sini terlihat intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak.

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah diatur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Disini terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan penilaian yang obyektif pula karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.

---

<sup>51</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992, 37.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 56 Ayat (1).

<sup>53</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992, 37.



## **REFERENSI :**

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung : Rosda Karya, 1997.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 56 Ayat (1).

## **PANITERA, SEKRETARIS DAN JURUSITA PENGADILAN AGAMA**

### **A. Panitera Pada Pengadilan Agama**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera**

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, di lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan**

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan antara lain :

- a. Membantu tugas-tugas wakil panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan gugatan
- b. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan pengadilan agama
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara gugatan yang diterima di Kepaniteraan
- d. Mencatat setiap perkara gugatan yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- e. Memimpin satuan kerja bagian kepaniteraan gugatan

- f. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan
- g. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
- h. Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- i. Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- j. Membukukan dalam buku register tentang Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama
- k. Membuat SKUM perkara gugatan untuk pembayaran panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/Bendahara Penerima
- l. Mendaftarkan perkara kedalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran
- m. Menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah memenuhi syarat kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Ketua Majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama
- n. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait
- o. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
- p. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya
- q. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun
- r. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- s. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- t. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- u. Melaksanakan administrasi perkara gugatan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan**

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan antara lain :

- a. Membantu wakil panitera dalam penyelenggaran administrasi kepaniteraan permohonan
- b. Melaksanakan administrasi perkara permohonan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara permohonan yang diterima di kepaniteraan
- d. Mencatat setiap perkara permohonan yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- e. Memimpin satuan kerja bagian kepaniteraan permohonan
- f. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan
- g. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
- h. Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- i. Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- j. Membukukan dalam buku register tentang penunjukan majelis hakim (PMH) oleh ketua pengadilan agama

- k. Membuat SKUM perkara permohonan untuk membayar panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/bendahara penerima
- l. Mendaftarkan perkara kedalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran
- m. Menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah memenuhi syarat kepada wakil panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada ketua majelis setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan agama
- n. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait
- o. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
- p. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya
- q. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya
- r. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- s. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- t. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- u. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan pengadilan agama.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum**

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum antara lain :

- a. Membantu wakil panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan hakim
- b. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
- c. Memimpin satuan kerja Kepaniteraan Hukum
- d. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- e. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- f. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan
- g. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
- h. Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- i. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar bagian Kepaniteraan
- j. Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Agama Islam tentang Peradilan Agama dan Hisab Rukyat
- k. Mengkoordinir pelaksanaan Hisab dan Rukyat serta pelaksanaan syahadah Rukyatulhilal berdasarkan petunjuk atasan
- l. Memberikan pelayanan tenaga Rohaniwan Islam sesuai dengan petunjuk atasan
- m. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait
- n. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
- o. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya
- p. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun
- q. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- r. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

- t. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, nasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- u. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan
- v. Membuat register pengaduan masyarakat.

## **B. Sekretaris Pada Pengadilan Agama**

### **1. Tugas Pokok Sekertaris**

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Fungsi Sekertaris**

- a. Membantu pimpinan dalam penyelenggarakan administrasi umum.
- b. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan
- c. Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan
- d. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- e. Membagi tugas pada kasubag
- f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kesekretariatan
- g. Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- h. Mengadakan rapat dinas
- i. Sebagai sekretaris, mengatur tugas kepala subbagian

- j. Menyusun proyeksi penerimaan biaya kepaniteraan dan rencana penggunaannya, dan menyampaikannya kepada Tim Pengelola setingkat lebih tinggi sebagai bahan penyusunan RKK AKL
- k. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) dan rencana kerja tahunan
- l. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun
- m. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku
- n. Sebagai Koordinator pelaksanaan tugas terpadu antara Tim Pengelola, Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan dalam hal mencairkan dana kepaniteraan pada KPPN setempat
- o. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan kesekretariatan
- p. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya dilingkungan kesekretariatan pada setiap akhir tahun
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan agama.
- r. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

### **3. Jurusita Pada Pengadilan Agama**

#### **a. Tugas Pokok Jurusita**

Sebagai Koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

#### **b. Fungsi Jurusita**

- 1) Sebagai koordinator dari para Juru Sita Pengganti



- 2) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti
- 3) Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara
- 4) Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain : Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar thalak dan penyitaan
- 5) Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali
- 6) Menjalankan Penetapan Sita dan Putusan Hakim (Eksekusi)
- 7) Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara ghoib dan Pelelangan Putusan atas sengketa
- 8) Mengkordinir, mendistribusikan dan melaksanakan panggilan bantuan dari luar wilayah Pengadilan Agama Palangka Raya
- 9) Mencatat register permohonan, Penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak serta Eksekusi
- 10) Membantu mengetik permohonan gugatan, P3HP dan keterangan waris
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya

**c. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita Pengganti**

Membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

**d. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita Pengganti**

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti
- 2) Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara
- 3) Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain : Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar thalak dan penyitaan
- 4) Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali
- 5) Menjalankan putusan Hakim (Eksekusi)
- 6) Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara ghoib
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

## **SUMBER HUKUM MATERIL DAN FORMIL PA**

Dalam dunia peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi dua, yaitu Hukum Materiil dan Hukum Formil yang sering disebut hukum acara.

### **A. Pengertian Hukum Materiil dan Formil**

Hukum materiil yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Hukum formil yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. Dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan.

### **B. Hukum Materiil Peradilan Agama**

Hukum materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefenisikan sebagai fikih. Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (sistem hukum positif) dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama, maka untuk mengeleminasi perbedaan tersebut di satu sisi dan adanya kesamaan disisi lain, dikeluarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur hukum tentang perkawinan, talak dan rujuk. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat biro Peradilan Agama No. B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1947 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> A Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, 147-148.

Dalam surat biro peradilan tersebut dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab-kitab yakni : Al-Bajuri, Fatkhul Mu'in, Syarqawi 'Alat Tahrir, Qalyubi wa Umairah/Al-Mahalli, Fatkhul Wahab, Tuhfah, Targhib Al-Mustaq, Qawanin Syari'ah Li Sayyid bin Yahya, Qawanin Syari'ah Li Sayyid Shadaqah, Syamsuri Li Faraid, Bughyat Al-Musytarsyidin, Al-Fiqih Al Madzahib Al-Arba'ah, dan Mughni Al-Muhtaj.<sup>55</sup>

Sebagai kitab-kitab ilmiah, maka hukum yang terkandung didalamnya pun belum merupakan hukum yang tertulis sebagaimana halnya undang-undang yang disahkan oleh pemerintah bersama DPR. Bagi yang berpendapat hukum positif adalah hukum yang tertulis, dan hukum yang menjadi pedoman Peradilan Agama masih dianggap bahwa hukum yang secara riil berlaku dalam masyarakat adalah hukum positif. Hal ini dilegalisasi oleh ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Untuk menjembatani hal tersebut maka sejak tanggal 02 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan ini merupakan awal pergeseran hukum islam menjadi hukum tertulis. Namun bagian lain dari perkawinan seperti Kewarisan dan Wakaf masih di luar hukum tertulis sehingga masih banyak terjadinya perbedaan putusan oleh Pengadilan Agama terhadap kasus yang sama karena pengambilan dan dasar hukumnya dari kitab fikih yang berbeda.

Pada sisi lain negara-negara Islam juga memberlakukan hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangannya. India pada masa Raja Al-Rijeb membuat dan memberlakukan hukum islam sebagai undang-undang yang terkenal dengan *Fatwa Alamfiri*. Turki

---

<sup>55</sup> A Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 148.

Utsmani dengan nama *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*. Sudan pada tahun 1983 mengodifikasi hukum Islam.

Atas dasar itu semua dan untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus mewujudkan hukum islam setidaknya-tidaknya di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf menjadi hukum tertulis, maka Indonesia merintis Kompilasi Hukum Islam dengan SKB Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Proyek Pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dengan SKB tersebut dilakukan pengumpulan data, wawancara dengan para ulama, melakukan loka karya dan hasil pengkajian, penalaahan kitab kemudian ditambah dengan studi banding ke negara-negara Islam lainnya seperti Maroko, Turki dan Mesir dan setelah semua data yang terkumpul menjadi naskah kompilasi, diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden tanggal 14 Maret 1988 tentang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam guna memperoleh landasan yuridis sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama.

Untuk menjadikan Kompilasi sebagai undang-undang memerlukan waktu yang terlalu panjang sedangkan kebutuhan hukum sudah sangat mendesak. Oleh karena itu, pemerintah mengambil jalan pintas yaitu dengan menggunakan instrumen hukum Instruksi Presiden, maka lahirlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden tersebut Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusannya No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 yang pada pokoknya mengajak jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya untuk menyebarluaskan dan sekaligus menggunakan Kompilasi Hukum Islam, yang berisi hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagai pedoman dan menyesuaikan masalah-masalah hukum Islam yang terjadi. Di samping itu, dalam surat Keputusan Menteri Agama tersebut memerintahkan agar Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama agar mengoordinasi pelaksanaannya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> A Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 150.

Kemudian dilakukan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas tugas dan wewenanganya, yaitu :<sup>57</sup>

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Shadaqah
8. Infaq
9. Ekonomi syari'ah

Dalam pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah : bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah dan lembaga keuangan mikro syari'ah.

### **C. Hukum Formil Peradilan Agama**

Meskipun lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura telah dibentuk oleh Pemerintah Belanda dengan Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl.1937 No 116 dan 610, di Kalimantan Selatan dengan Stbl. 1937 No. 638 dan 639, kemudian setelah kemerdekaan RI, pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan PP No. 45 Tahun 1957 tetapi dalam peraturan tersebut tidak disinggung sama sekali tentang hukum acara yang harus digunakan oleh hakim dalam memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena tidak ada ketentuan resmi tentang hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, maka para hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama mengambil inti sari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fikih yang dalam penerapannya berbeda antar satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lainnya.

---

<sup>57</sup> A Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 150-151.

Oleh karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura. *Reglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa dan Madura, maka kedua aturan hukum acara ini diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut.. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a) *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv)

Hukum acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justie* dan *Residentie Gerecht*. Ketentuan ini ditetapkan dengan Stbl. 1847 No. 52 dan Stbl. 1849 No. 63. Berlaku sejak tanggal 01 Mei 1848. Dengan dihapuskannya *Raad van Justie* dan *Hoogerechtshof*, maka B.Rv yang ini sudah tidak berlaku lagi. Tetapi oleh karena hal yang diatur dalam B.Rv masih banyak yang relevan dengan perkembangan hukum acara saat ini, dan untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan-ketentuan tersebut masih dipakai dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum. Misalnya, tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, dan ketentuan hukum acara perdata lainnya.

b) *Inlandsch Reglement* (IR)

Ketentuan hukum acara lain diperuntukkan untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini diubah namanya menjadi *Het Herziene Indonesia Reglement* (HIR) atau disebut juga *Reglement Indonesia* yang diperbarui RIB yang diberlakukan Stbl. 1848 No. 16 dan Stbl. 1941 No. 44.

c) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing yang berada diluar Jawa dan Madura yang berperkara di *Landraad*. Bab II R.Bg memuat bagian Hukum

Acara Perdata yang terdiri dari 7 titel, yang masih digunakan sebagai Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang adalah titel IV dan V, sedangkan titel I, II, III, VI dan VII tidak digunakan lagi seiring dengan dihapuskannya Pengadilan Districgerecht, Districtraad, Magistraadgerecht, Residentiegerecht dan R. van Justitie.

d) Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW)

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 s/d 1993.

e) Wetboek van Koophandel (WvK)

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata, sebagai sumber penerapan acara dalam praktik peradilan. WvK diberlakukan dengan Stbl. 1847 No. 23 khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275.

f) Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa, Madura sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 terakhir keduanya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam peraturan perundang-undangan ini memuat beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata dalam praktik Peradilan di Indonesia.
- 3) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang memuat tentang Acara



Perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan asasi dalam proses perkara di Mahkamah Agung RI.

- 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum tersebut.
- 5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
- 6) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 54 disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali hal-hal lain yang telah diatur secara khusus.
- 7) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf.

g) **Yurisprudensi**

Dalam kamus Fockerna Andrea sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, S.H (1998 : 14) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama.

Hakim tidak boleh terikat dalam putusan yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas "*the binding force of precedent*", jadi bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi dengan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat keputusan sebelumnya.

h) **Surat Edaran Mahkamah Agung RI**

Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim.

Surat edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI ini banyak pakar hukum menganggap bahwa Mahkamah Agung RI sudah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang diatur pada Pasal 195 HIR dan R.Bg sekaligus tampaknya pendapat tersebut ada benarnya tetapi apabila dilihat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang baru, disebutkan dalam pasal 11 ayat (4) ditegaskan bahwa Mahkamah Agung RI berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah Mahkamah Agung RI berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Jadi, bukan mencampuri kemandirian hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang dianjurkan kepadanya.

#### i) Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Menurut Sudikno Mertokusumo (1988 :8), doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan hukum acara guna, hakim dapat mengadili hukum acara perdatta. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.

Sebelum berlaku Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak digunakan oleh hakim peradilan agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fikih. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No. B/ 1/ 1735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan peraturan pemerintahan No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar menggunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dalam kitab fikih.

Dengan menunjukkan kepada 13 buah kitab fikih, diharapkan hakim Peradilan Agama dapat mengambil atau menyerahkan tata cara

beracara dalam Peradilan Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang dianjurkan kepadanya dilingkungan Peradilan Agama. Beberapa asas hukum acara peradilan agama, antara lain :

- 1) Pemeriksaan perkara dimulai setelah diajukan gugatan/permohonan,
- 2) Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau tidak jelas,
- 3) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
- 4) Putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim",
- 5) Pengadilan mengadili dengan menurut hukum dan dengan tidak membedakan orang,
- 6) Pengadilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,
- 7) Sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian dilakukan sidang tertutup,
- 8) Rapat pemusyawaratan hakim bersifat rahasia,
- 9) Penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

**REFERENSI :**

Djalil A Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana  
Prenada Media Group, 2006.

## **PROSPEK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA**

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum di Indonesia telah eksis seiring dengan perjalanan bangsa dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Dalam rentang waktu tersebut, peradilan agama telah melewati rangkaian proses transformasi kelembagaan dalam rangka memperkuat eksistensinya dalam kerangka hukum di Indonesia.

Salah satu pijakan awal yang krusial dalam kemapanan peradilan agama secara kelembagaan adalah kodifikasi peraturan-peraturan tentang peradilan agama ke dalam UU No.7 tahun 1989 mengenai peradilan agama. Dengan kodifikasi tersebut, maka peradilan agama memperoleh pengakuan hukum yang luas sebagai lembaga hukum yang otoritatif dan independen. Implikasi lebih jauh adalah adanya transparansi mengenai yurisdiksi peradilan agama dalam dinamika hukum nasional, sehingga putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal inilah yang sesungguhnya mengawali kiprah nyata peradilan agama dalam rangka penegakan supremasi hukum secara massif.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, kebutuhan akan pemenuhan rasa keadilan semakin menguat, sehingga diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Peradilan agama dituntut untuk mengambil peran yang lebih jauh dalam pemenuhan rasa keadilan di masyarakat. Satu hal yang sangat riskan dalam konteks ini adalah masalah ekonomi syari'ah yang penanganannya belum maksimal. Sebagai yang kita ketahui, perkara hukum yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah selama ini ditangani oleh pengadilan negeri yang secara substansial kurang kompeten, mengingat basis pendalaman hukumnya adalah hukum positif, sedangkan perkara ekonomi syari'ah berbasis hukum Islam. Lebih jauh, dewasa ini telah banyak berdiri lembaga-lembaga

keuangan syari'ah yang melayani kebutuhan finansial masyarakat, sehingga secara hukum perlu diakomodir dalam lembaga hukum yang kompeten.

Adalah peradilan agama yang kemudian dianggap sebagai lembaga yang representatif dan kompeten dalam menangani perkara ekonomi syari'ah. Ada beberapa alasan yang mendasari hal ini. *Pertama*, hakim-hakim dalam peradilan agama memiliki pendalaman hukum Islam yang lebih dibandingkan dengan hakim-hakim umum di pengadilan negeri. Meski hal tersebut bukanlah hal yang mutlak, namun paling tidak hal ini dapat digunakan sebagai parameter awal yang memperkuat asumsi bahwa peradilan agama adalah lembaga yang paling representatif mengenai hal ini. *Kedua*, peradilan agama secara faktual lebih 'bersih' dibandingkan dengan pengadilan negeri. Sebagai yang kita ketahui, dalam dinamikanya, lembaga peradilan agama lebih independen dan transparan dibandingkan dengan pengadilan negeri dalam menjalankan otoritasnya. Cukup banyak bukti yang mendukung hal ini. Salah satunya adalah sangat jarang ditemukan penyimpangan aturan yang dilakukan oleh aparat pengadilan agama. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kinerja aparat pengadilan negeri yang hampir setiap saat terdengar penyimpangan aturan hukum, antara lain terlihat jelas dalam produk-produk hukum yang dikeluarkan.

Aktualisasi nyata dari pertimbangan-pertimbangan diatas adalah amandemen UU No.7 tahun 1989 menjadi UU No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Amandemen ini membawa implikasi yang signifikan bagi yurisdiksi peradilan agama. Hal ini ditunjukkan dengan ekspansi wewenang peradilan agama yang dipercayakan untuk menangani perkara-perkara ekonomi syari'ah di masyarakat. Inilah sesungguhnya yang menjadi substansi lembaga peradilan agama secara yuridis, yaitu menjadi wadah bagi penyelesaian perkara-perkara hukum, terutama bagi umat muslim yang mendambakan keadilan yang hakiki. Segalanya kembali pada lembaga peradilan agama itu sendiri untuk senantiasa menjaga independensinya dan menjadi pilar bagi penegakan supremasi hukum di Indonesia. Pada akhirnya, realitas-lah yang akan membuktikannya.

#### A. Dinamika Peradilan Agama dalam Konteks Historis

Peradilan agama secara historis telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1808. Kemudian pada tahun 1823, terbit Resolusi Gubernur Jenderal No.12 yang menetapkan berdirinya pengadilan agama Palembang dengan kewenangan pada perkara-perkara perdata. Perkara pidana pada saat itu diserahkan ke pengadilan negeri.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, peradilan agama mengalami transformasi yang signifikan dalam konteks kelembagaan. Peradilan agama secara institusional berada di bawah naungan Kementerian Kehakiman. Dengan demikian, segala bentuk aktifitas yuridis dalam lingkup peradilan agama harus dipertanggungjawabkan kepada kementerian kehakiman.

Pada tahun 1946, terbit Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1946 yang menetapkan bahwa peradilan agama secara institusional berada di bawah naungan kementerian agama. Dengan ketetapan ini, dinamika peradilan agama mengalami perubahan yang cukup signifikan. Orientasi keagamaan sedikit demi sedikit mengalami progresifitas yang mewarnai derap langkah peradilan agama. Peradilan agama sangat identik dengan agama, sehingga ajaran agama memiliki intervensi yang signifikan dalam putusan maupun penetapan yang dikeluarkan. Selanjutnya, setelah dikeluarkannya UU No.19 tahun 1948, maka peradilan agama secara institusional berada dalam lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, maka peradilan agama secara perlahan mulai mensejajarkan diri dengan peradilan-peradilan umum yang telah ada. Dari hal ini pula, peradilan agama secara perlahan mengalami penguatan secara institusional dan berimplikasi pada kekuatan hukum dari setiap putusan maupun penetapan yang dikeluarkannya.

Eksistensi peradilan agama dalam tata hukum Indonesia semakin kuat. Hal ini ditunjukkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 yang menetapkan pembentukan pengadilan agama di luar pulau Jawa, yaitu di pulau Madura dan

Kalimantan Selatan. Selanjutnya, kedudukan peradilan agama menjadi sejajar dengan peradilan lain berdasarkan ketentuan UU No.14 tahun 1970. Dengan demikian, maka otoritas peradilan agama diakui secara penuh dalam tata hukum di negara Indonesia.

Pada tahun 1989, pemerintah mengeluarkan UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dengan keluarnya undang-undang ini, maka institusi peradilan agama telah mendapatkan bentuknya yang sempurna, baik kedudukannya secara institusional maupun transparansi wewenang dan kelengkapan aparat secara struktural. Salah satu asas yang menjadi dasar bagi proses peradilan dalam lingkup peradilan agama berdasarkan undang-undang ini adalah penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya dinamika kehidupan bangsa Indonesia, maka perkara-perkara hukum di masyarakat sangat potensial bertambah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Salah satu yang menjadi aksentuasi adalah perkembangan lembaga ekonomi syari'ah yang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagai deskripsi awal, perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka tahun 2000an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Asset perbankan syari'ah ketika itu belum mencapai Rp 1 triliun, maka saat ini assetnya lebih dari Rp 22 triliun. Lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum, kini telah berjumlah 34 lembaga asuransi syariah (Data AASI 2006). Demikian pula obligasi syariah tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syariah. Dari sini, peradilan agama, secara institusional dituntut untuk terlibat dalam penanganan kasus-kasus pidana ekonomi syari'ah. Namun, kendala yang cukup riskan menghambat upaya tersebut, mengingat otoritas peradilan agama yang hanya menangani perkara-perkara di bidang perdata, seperti wakaf, cerai, hibah, zakat, infaq, sadhaqah, waris, dan perkawinan. Dapat dipahami



mengingat masalah-masalah yang muncul di masyarakat banyak yang berkualifikasi pidana, sehingga 'tangan' peradilan agama tidak sanggup untuk menyentuhnya.

Hal diatas yang agaknya menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam upaya melibatkan peradilan agama pada penyelesaian perkara-perkara pidana ekonomi syari'ah. Dasar yang menjadi pertimbangan lainnya adalah realitas yang memperlihatkan betapa peradilan umum kewalahan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan hingga banyak perkara yang terkatung-katung tanpa ada kejelasan mengenai penyelesaiannya. Hal tersebut lebih diperparah dengan banyaknya keputusan peradilan umum yang tergolong manipulatif karena pertimbangan hukum yang diberikan sering tidak menyentuh substansi hukum yang sesungguhnya, ditambah lagi dengan maraknya mafia peradilan yang semakin menenggelamkan reputasi peradilan umum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Karena itu, sangatlah pantas untuk mengeluarkan suatu aturan baru sebagai upaya progresif dalam menciptakan tatanan hukum yang lebih representatif, tentunya dengan pemberian wewenang pada peradilan agama yang lebih komprehensif dalam perkara pidana .

Amandemen UU No.7 tahun1989 menjadi UU No.3 tahun 2006 merupakan aktualisasi dari hal diatas. Dengan undang-undang ini, maka peradilan agama diberi kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, reksadana syari'ah, asuransi syari'ah, dan obligasi syari'ah. Dengan peraturan ini, peradilan agama dituntut untuk menjalankan peran peradilan sebagai pilar utama dalam menegakkan supremasi hukum. Peradilan agama mengemban ekspektasi besar masyarakat untuk mengiring perubahan menuju tatanan hukum yang representatif dan transparan, serta memenuhi dahaga keadilan di masyarakat yang selama ini ditutupi oleh tabir mafia peradilan yang menggerogoti dinamika hukum di Indonesia.

## B. Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No.3 tahun 2006

Peradilan Agama mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang waktu yang panjang sejak Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia.<sup>58</sup> Sejalan dengan dinamika hukum yang semakin kompleks, peradilan agama berusaha tampil sebagai suatu institusi yang menjadi pilar bagi suksesnya penegakan supremasi hukum. Karena itu, eksistensi peradilan agama perlu diperkuat dengan aturan normatif yang memberi otoritas yang luas (yurisdiksi) kepada peradilan agama.

Pada Desember 2006, pemerintah menetapkan amandemen terhadap UU No. 7 tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Penetapan Undang-undang baru ini membawa implikasi yang signifikan bagi peradilan agama, baik dalam konteks institusional maupun dalam konteks kewenangan mengadili (yurisdiksi).

Dalam konteks *institusional*, peradilan agama memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan umum lainnya dalam tata hukum Indonesia. Lebih lanjut, substansi dari UU No. 3 Tahun 2006 salah satunya menetapkan kebijakan satu atap dalam institusi kehakiman. Peradilan agama yang sebelumnya masih dalam naungan Departemen Agama, setelah amandemen maka peradilan agama berada di bawah otoritas atau naungan Mahkamah Agung. Hal ini membawa keuntungan yang sangat signifikan bagi peradilan agama itu sendiri. *Pertama*, peradilan agama mendapatkan pengakuan yang luas dari lembaga-lembaga atau institusi hukum lainnya. Sebagai yang kita ketahui, sebelum kebijakan satu atap ini, peradilan agama cenderung dipandang sebelah mata sehingga menurunkan reputasinya sebagai lembaga pengadil. Dapat dimaklumi, sebab saat itu selain belum dibawah langsung oleh Mahkamah Agung, partisipasi peradilan agama dalam lalu lintas hukum kurang komprehensif. *Kedua*, peradilan agama setelah keluarnya kebijakan satu atap ini mulai mendapatkan prioritas yang seimbang dengan

---

<sup>58</sup> Cik Hasan Bsiri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 258.

peradilan umum lainnya, seperti peradilan negeri. Peningkatan prioritas itu antara lain ditandai dengan bertambahnya hakim agung yang direkrut dari hakim-hakim tinggi yang berlatar belakang hakim peradilan agama. Adalah sesuatu yang cukup menggembirakan ketika hakim-hakim agama (hakim tinggi) diberi akses yang luas sebagaimana yang berlaku bagi hakim-hakim negeri (hakim tinggi) untuk menjadi hakim agung, sebab dengan hal ini partisipasi peradilan agama secara tidak langsung dalam upaya penegakan supremasi hukum menjadi lebih signifikan dan sebagai salah satu wahana bagi aktualisasi visi luhur lembaga peradilan agama (pengayoman).

Dalam konteks kewenangan mengadili, yurisdiksi peradilan agama mengalami perluasan yang cukup signifikan. Peradilan agama tidak lagi hanya menangani masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, namun lebih dari itu peradilan agama diberikan wewenang yang lebih krusial. Pada pasal 49 point yang disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan UU No. 3 tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yang meliputi:

- a) Bank syariah
- b) Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c) Asuransi syari'ah
- d) Reasuransi syari'ah,
- e) Reksadana syari'ah
- f) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- g) Sekuritas syariah
- h) Pembiayaan syari'ah

- i) Pegadaian syari'ah
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan
- k) Bisnis syari'ah

Dengan perluasan kewenangan di atas, maka partisipasi peradilan agama dalam menjaga stabilitas hukum di masyarakat lebih luas. Peranan peradilan agama sangat diharapkan, terutama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah yang selama ini belum terlaksana dengan baik. Eksistensi peradilan agama akan benar-benar teruji jika kedepan, peradilan agama dapat menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syari'ah dengan putusan-putusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

### C. Prospek Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia

Kedepan, peradlan agama akan diperhadapkan dengan berbagai peluang dan tantangan yang akan menentukan sejauh mana eksistensinya dalam dinamika kehidupan masyarakat. Peluang dan tantangan ini bukanlah sesuatu yang dikotomik, bukan pula quasi yang sengaja dideskripsikan untuk menghambat kemajuan peradilan agama secara institusional, melainkan merupakan bagian inheren yang akan senantiasa memberi warna dalam dinamika kelembagaan serta semakin mendewasakan lembaga peradilan agama dalam mewujudkan visi keadilan yang telah disepakati. Taufiq, melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi sejauh mana prospek peradilan agama kedepan.<sup>59</sup> Analisis Taufiq meliputi:

1. Kekuatan (Strength) peradilan agama terletak pada:
  - a. Besarnya dedikasi dari aparat-aparat peradilan agama terhadap tugas dan tanggung jawab yang mereka pikul karena didasari oleh sebuah keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas dan tanggung jawabnya

---

<sup>59</sup> Cik Hasan Bsiri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 262-263.

merupakan ibadah kepada Tuhan. Keadaan seperti ini senantiasa akan memacu semangat mereka untuk maksimal dalam menjalankan tugas dan berjuang untuk kemajuan peradilan agama secara khusus, dan bangsa Indonesia secara umum.

- b. Hukum (aturan-aturan) yang diaplikasikan di peradilan agama bersentuhan langsung dengan sendi dasar kehidupan masyarakat, yaitu hasrat untuk memperoleh keadilan dalam segala sisi dan ruang kehidupan. Selain itu, aturan-aturan tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan aspek teologis (keimanan), sehingga berimplikasi kuat terhadap perhatian masyarakat, yang dengannya membantu dalam aktualisasi hukum yang hakiki.

2. Kelemahan (Weakness) peradilan agama terletak pada:

- a. Sulit berkembangnya unsur-unsur administratif lembaga secara kuantitatif. Hal ini berimplikasi pada masih belum tertibnya administrasi peradilan agama secara menyeluruh.
- b. Masih lemahnya organisasi pembinaan dan pelaksanaan fungsi kontrol di Mahkamah Agung.
- c. Masih terdapat stigma di masyarakat yang menganggap bahwa peradilan agama hanya mengurus masalah perceraian dan perkara-perkara perdata Islam lainnya. Tentunya, keadaan demikian menyebabkan munculnya suatu inhibitor tertentu ditengah upaya peradilan agama untuk tetap eksis dan mengaktualisasikan visi keadilan.
- d. Harus diakui bahwa masih banyak hakim di pengadilan agama yang belum menguasai hukum perdata dan hukum acara perdata nasional dengan baik. Disamping itu, banyak pula panitera dan jurusita yang belum menguasai tekhnis litigasi. Hal ini tentu menjadi

kelemahan yang sangat fundamental bagi peradilan agama itu sendiri, selain karena berimplikasi kuat terhadap putusan-putusan yang diberikan juga semakin berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat akan kapabilitas lembaga peradilan agama sebagai wujud otoritas penegak supremasi hukum.

- e. Jumlah aparat di lingkungan peradilan agama secara umum masih terbatas. Keterbatasan ini secara langsung akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari kinerja peradilan agama sehingga dapat mengancam eksistensi kelembagaannya di masyarakat.

3. Kesempatan (Opportunity) peradilan agama terletak pada:

- a. Adanya amandemen UU No. 7 tahun 1989 menjadi UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Dengan amandemen ini, maka secara institusional eksistensi peradilan agama mengalami penguatan karena kewenangan mengadilinya diperluas. Perluasan kewenangan ini akan membawa peradilan agama ke kasta yang lebih tinggi sebagai media untuk mempertahankan eksistensi kelembagaannya.
- b. Seiring dengan semakin meningkatnya aktifitas dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan bidang ekonomi syari'ah, maka peradilan agama dituntut untuk lebih proaktif dalam menjaga agar tetap berada pada koridor hukum yang benar. Inilah kesempatan emas bagi peradilan agama untuk menunjukkan eksistensi dan peranannya dalam menjaga stabilitas kehidupan di masyarakat.

4. Ancaman (*Threat*) peradilan agama terletak pada:

- a. Biaya perkara yang masih cukup tinggi sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin berperkara di peradilan agama.

- b. Anggaran dana untuk operasionalisasi peradilan agama masih rendah sehingga menghambat aparatnya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

**REFERENSI :**

Cik Hasan Bsiri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.



**Dr. Hj. Aah Tsamrotul Fuadah, M.Ag**

**BUKU DARAS**  
**PERADILAN AGAMA DI INDONESIA**



ISBN 978-623-94714-1-5 (PDF)

